

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2010-2016 DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

FEBRI AQUARIANSYAH

NPM : 1451010185

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1439 H / 2018 M**

**Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung
Tahun 2010-2016 Dalam Persepektif Ekonomi Islam**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.S.I.
Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1439 H / 2018 M**

Abstrak

Pembangunan suatu daerah merupakan hal yang sangat menjadi perhatian pemerintah daerah, perhatian pemerintah tersebut salah satunya diwujudkan melalui alokasi anggaran untuk pembangunan manusia, yakni belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu tolak ukur dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. IPM Kota Bandar Lampung tumbuh lambat setiap tahunnya padahal faktor ekonomi lainnya seperti Pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan.

Rumusan masalah adalah apakah belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung dan apakah belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Kota Bandar Lampung dan bagaimana pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara parsial dan silmutan terhadap IPM Kota Bandar Lampung serta mengetahui bagaimana pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM Kota Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari BPS Kota Bandar Lampung, dinas pendidikan dan dinas kesehtan Kota Bandar Lampung. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* yaitu tahun 2010-2016. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan belanja pemerintah bidang pendidikan (X_1) belanja pemerintah bidang kesehatan (X_2) dan Indeks Pembangunan manusia (Y).

Secara parsial, pendidikan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pengeluaran bidang pendidikan minimal 20% dari total Belanja Daerah. Kemudian kesehatan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini dikarenakan belanja bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan adanya UU No 36 tahun 2009 besar anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10% dari Belanja Daerah di luar gaji, sedangkan pada kenyataannya pengeluaran bidang kesehatan pada tahun 2010-2016 kurang dari 10%. Hasil uji F belanja Pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam pandangan Ekonomi Islam, dimana harus mengandung enam prinsip umum mengenai belanja pemerintah, yakni kesejahteraan masyarakat, penghapusan kesulitan hidup, mengutamakan kepentingan khalayak ramai, menghindari kerugian publik, pemberian manfaat, dan pengadaan barang publik wajib terpenuhi. Dalam alokasi belanja bidang kesehatan belum sesuai dengan standar persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, jadi belum terpenuhinya enam perinsip tersebut dalam belanja pemerintah di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Pendidikan, Kesehatan, IPM



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka skripsi saudara :

Nama : Febri Aquariansyah
 NPM : 1451010185
 Program Study : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH
 BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
 TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2010-2016
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
MENYETUJUI

untuk dimunafasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munafasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Madnasir. S.E., M.Si.
NIP. 19750424 2002121 1 00 1

Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.
NIP. 19860517 201503 1 005

MENGETAHUI
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Madnasir. S.E., M.Si.
NIP. 197504 24 200212 1 001
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

Sekretariat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarampe, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2010-2016 DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM** disusun oleh : Febri Aquariansyah, NPM : 1451010185, program studi : Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang monaqosyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa / 05 Juni 2018

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : H. Supaijo, SH., MH. (.....)

Sekretaris : Suhendar, SE., M.S., Ak. (.....)

Penguji I : Dr. Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy. (.....)

Penguji II : Madnasir, S.E., M.S.I. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin. M.A
NIP.19580824 198903 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اُنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (Q.S Al-Mujadilah: 11)

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Febri Aquariansyah. Lahir di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung pada tanggal 01 Febuari 1994. Penulis terlahir dari 3 bersaudara, pasangan Buharai dan Trima Suprihatin.

Jenjang pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. TK AL-Irsyad Bandar Lampung 1999-2000;
2. Sekolah Dasar Negeri 3 Bumi Waras 2000-2007;
3. Sekolah Menenga Pertama Negeri 17 Bandar Lampung 2007-2010;
4. Sekolah Menengah Atas Adiguna Bandar Lampung 2011-2013;
5. Pada tahun 2014 penulis menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku kepada ayah Buhari dan ibu Trima Suprihatin yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakan setelah aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kakakku Rudi Septian dan Adikku Muhammad Fatir Al-Ghani yang turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungannya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Teman hidupku Ira Safira, S.E yang sabar menemani dalam suka duka, memberi semangat sejak awal kuliah sampai mendapatkan gelar sarjana, dan motivasinya sampai secepat ini.
4. Teman-Teman seperjuangan yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kawan-kawan Ekonomi Syariah kelas e angkatan 2014.
5. Teman-Teman Prodi Ekonomi Syariah tahun 2014 yang memberi semangat serta dukungan.
6. Bapak Ibu pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak ibu dosen dan segenap tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmunya.
7. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung selalu jaya, maju dan berkua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan karunia dan anugrah-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 Dalam Persepektif Ekonomi Islam“ dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang penuh dengan cahaya Islam.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini tanpa ada dorongan, bantuan dan kerja sama dari pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada pihak yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Madnasir S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan nasihat
4. Madnasir S.E., M.S selaku pembimbing I dan Muhammad Kurniawan, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan nasihat dan arahan kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang mendidik dan memberi ilmu pengetahuan.

6. Staf dan karyawan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan 2014 prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan karya tulis ini.
8. Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kota Bandar Lampung beserta staf pegawai yang bersedia memberi izin penelitian dan pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat cantumkan namanya namun penulis mengucapkan terima kasih.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Febri Aquariansyah
NPM. 1451010185

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Indeks Pembangunan Manusia	16
1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia	20

2. Pengukuran Dan Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
B. Indeks Pembangunan Manusia Ditinjau Dalam Persepektif Ekonomi Islam Peran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia	34
C. Peran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia	41
1. Peran Dalam Pembangunan	41
2. Peran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia	41
D. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks pemabngunan manusia	46
1. Pengruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	46
2. Pengruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	48
E. Pengeluaran pemerintah dan kebijakan publik di tinjau dalam persepektif ekonomi islam	49
F. Penelitian Terdahulu	52
G. Kerangka Pemikiran	58
H. Hipotesis	61

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	66
-------------------------------------	----

B. Jenis dan Sumber Data	67
C. Metode Pengumpulan Data	68
D. Populasi dan Sampel.....	67
E. Definisi Variabel Penelitian	69
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Obyek Penelitian	78
B. Gambar Hasil Penelitian	85
C. Analisis Data	89
D. Pembahasan	102
1. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung.....	102
2. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung.....	107
3. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung	113
4. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 Dalam Persepektif Ekonomi Islam.....	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: IPM Kota Bandar Lampung dan Kota Metro 2010-2016.....	8
Tabel 1.2	: Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kota Bandar Lampung (Dalam Rupiah) dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.....	10
Tabel 2.1	: Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM.....	26
Tabel 2.2	: Sumber-Sumber Pengeluaran Negara Primer dan Sekunder yang Berhubungan dengan Masyarakat pada Zaman Rasulullah SAW dan Empat <i>Khalifah</i>	50
Tabel 3.1	: Daftar Variabel Penelitian.....	70
Tabel 4.1	: Daftar Wali Kota Bandar Lampung Berserta Periode Jabatan.....	81
Tabel 4.2	: Jumlah Fasilitas Pendidikan	82
Tabel 4.3	: Jumlah Fasilitas Kesehatan	83
Tabel 4.4	: Total Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung	85
Tabel 4.5	: Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2010 –2016	87
Tabel 4.6	: Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2010 –2016	88
Tabel 4.7	: Hasil Uji Normalitas.....	98
Tabel 4.8	: Hasil Uji Multikolinieritas.....	90
Tabel 4.9	: Hasil Uji Autokorelasi.....	91
Tabel 4.10	: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	93
Tabel 4.11	: Hasil Regresi Linier Berganda	94
Tabel 4.12	: Hasil Uji Simultan (F)	97
Tabel 4.13	: Hasil Uji Koefisien Determinasi	100

Tabel 4.14	: Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kota Bandar Lampung (Dalam Rupiah) dan Realisai Anggaran Belanja Daerah Kota Bandar Lampung	103
------------	--	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Diagram Penghitungan IPM	23
Gambar 2	: Diagram Penghitungan IPM	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi .

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor
01 tahun 2017 tentang penunjukan dosen pembimbing
skripsi mahasiswa semester genap tahun akademik
2017/2018.

Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi.

Lampiran 4 : Surat Riset oleh KESBANGPOL Kota Bandar Lampung.

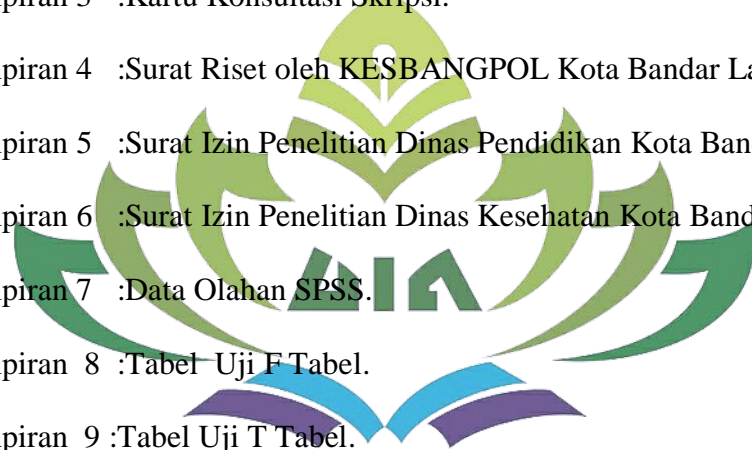
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Lampiran 7 : Data Olahan SPSS.

Lampiran 8 : Tabel Uji F Tabel.

Lampiran 9 : Tabel Uji T Tabel.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan dapat menghindari kesalah pahaman dikalangan pembaca, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indexs Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016.

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.²
3. Belanja pemerintah adalah pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.58

²*Ibid.*, h.145

³Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.168.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵
6. Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidika, kesehatan dan pendapatan rill perkapita yang disesuaikan.⁶
7. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal.⁷
8. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah.⁸

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Online Tersedia di: http://www.kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf, (15 Desember 2017)

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Online Tersedia di: <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU%20Nomor%2036%20Tahun2%20009%20tentang%20Kesehatan.pdf>, (15 Desember 2017)

⁶Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonmi*, (Jakarta: 2011), h. 57

⁷Yusuf Qhardawai, *Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah*, Cet II Bairut Libanon, 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin, h.1

⁸Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kota bandar lampung 2010-2016 dalam perspektif ekonomi islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan tolak ukur pencapaian suatu daerah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang di miliki. Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Kondisi indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota yang berada di Provinsi Lampung yakni Kota Bandar Lampung yang mengalami kenaikan yang masih lamban. Dalam upaya peningkatan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah mengalokasikan sejumlah dana yang dianggarkan dalam APBD. Dalam pengeluaran belanja di bidang pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah berharap kemajuan pada bidang tersebut akan meningkat. Dari pemaparan tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruh belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

2. Alasan Subjektif

Karena pokok bahasan skripsi ini relevan dengan spesialisasi keilmuan penulis mempelajari di jurusan Ekonomi Syariah serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data-data penelitian yang menunjang dalam penelitian ini, serta adanya motivasi dan tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yang ada di perpustakaan, sehingga dengan mudah skripsi ini dapat terselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran peningkatan mutu SDM atau pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses dan memperoleh peningkatan jumlah orang yang mempunyai keahlian pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.⁹

Manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu negara menjadi lebih baik, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja diukur dari pendapatan domestik bruto, tetapi juga dari harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya. Peran pemerintah juga penting dalam

⁹M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT RajaWali Pers Persada, 2014), h. 414

meningkatkan pembangunan manusia, melalui alokasi dana untuk masyarakat yang digunakan untuk peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.¹⁰

Dalam Islam memandang peningkatan SDM sangatlah penting dalam kemajuan suatu negara, Allah SWT memberikan akal yang merupakan alat untuk menuntut ilmu dan ilmu merupakan alat untuk mempertahankan diri dari segala kesulitan. Maka jelas pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup agar terhindar dari segala kesulitan, sebagaimana firman Allah SWT :¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١١

Arinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹² (Q.S Al-Mujadilah: 11)

Ayat di atas merupakan penjelasan bagaimana Allah sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan derajat atau taraf hidup manusia. Untuk memperoleh pendidikan diperlukan kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan

¹⁰Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.278

¹¹Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.5

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), h.543

penduduk. Kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada produktivitas masyarakat, sehingga pembangunan dibidang kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.¹³ Oleh karena itu kesehatan juga penting dalam peningkatan SDM yang akhirnya berdampak pada peningkatan kemajuan suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul “Human Development Report” Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapita. IPM adalah indikator menggunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang di capai dan setandar kehidupan.¹⁴

Indikator kesehatan diukur dengan usia panjang atau tingkat harapan hidup (*life expectancy*), indikator pendidikan diukur dengan rata-rata melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*).

¹³BPS Kota Bandar Lampung, *Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung Tahun 2012*, h.6

¹⁴Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2003), h.167

Sementara itu standar kehidupan diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).¹⁵

Akan tetapi ada tahun 2010 UNDP menyempurnakan metode lama dengan metode baru, dengan mengganti salah satu indikator yaitu angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia, sehingga tidak efektif lagi jika masih menggunakan angka melek huruf.¹⁶

UNDP mendefinisikan IPM sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia yang menempati urutan ke 121 dari 187 Negara dan berada di posisi ke 6 dari 10 negara ASEAN. Pada tahun 2010-2012.¹⁷

Di Provinsi Lampung pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2016 IPM Provinsi Lampung berjumlah 67,65 angka tersebut naik

¹⁵ Mudrajat Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, Cetakan kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.97

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2015), h.6

¹⁷ Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lopian, Imelda Lajuck, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara”.(Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan, Manado, Volume 17 No. 01, 2017), h. 207.

dari tahun sebelumnya yang berjumlah 66,96. Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung memiliki angka indeks pembangunan manusia menengah. Berikut angka Indeks Pembangunan Manusia di lihat dari tabel 1.1 berikut di bawah ini.

Tabel 1.1

Tabel IPM Kota Bandar Lampung dan Kota Metro 2010-2016

No	Tahun	IPM Kota Bandar Lampung
1	2010	71,11
2	2011	72,04
3	2012	72,88
4	2013	73,93
5	2014	74,34
6	2015	74,81
7	2016	75,34

Sumber : BPS Provinsi Lampung¹⁸

Dari tabel di atas terlihat IPM Kota Bandar Lampung meningkat di setiap tahunnya, akan tetapi angka indeks pembangunan manusia Kota Bandar Lampung memiliki nilai IPM 0,50 samapai 0,79 yang artinya IPM Kota Bandar Lampung Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia menengah.

¹⁸ *Indeks Pemangunan Manusia Menurut Kabupaten\Kota 2010-2016*, online tersedia di: <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2016/10/03/11/ indeks pembangunan manusia provinsi lampung menurut kabupaten kota 2010-2016.html>.

IPM digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu wilayah di dunia. Berdasarkan indeks ipm di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 samapai 0,50.
- b. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM 0,50 samapai 0,79.
- c. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM 0,79 samapai 1.¹⁹

Maka dapat disimpulkan pada tabel 1.1 bahwa indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung tergolong dalam tingkatan *medium human depelovment* atau pembangunan manusia yang tergolong sedang yakni kisaran antara 0,50 sampai 0,79.

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan, karena manusia merupakan modal utama dalam pembagunan suatu daerah. Kebijakan alokasi APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing secara optimal.

¹⁹ Lincolin Aryad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN), h.46

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada pembangunan manusia yakni bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor yang sangat vital dalam pembentukan modal manusia yang akan berdampak pada pembangunan suatu daerah. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Untuk mengetahui perkembangan realiasi anggaran belanja pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kota Bandar Lampung (Dalam Rupiah) dan Realisai Anggaran Belanja Daerah Kota Bandar Lampung

No.	Tahun	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Total Belanja Daerah
1	2010	434.285.245.588	57.022.929.944,00	926.170.641.461,56
2	2011	551.417.693.499	79.452.364.404,40	1.154.628.593.734,84
3	2012	603.026.703.446,00	127.599.898.813,80	1.464.988.926.883,88
4	2013	716.387.361.619,00	107.392.122.622,51	1.779.859.865.267,85
5	2014	713.850.652.054,00	148.732.226.265,48	1.799.475.905.415,28
6	2015	653.445.452.969,74	156.736.921.372,85	1.757.419.863.235,28
7	2016	717.138.518.818,00	189.816.675.219,99	2.347.418.763.908,28

Sumber : Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan BPS Kota Bandar Lampung²⁰

²⁰ Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan BPS Kota Bandar Lampung, *Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2016*.

Tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan dalam Belanja Daerah dan realisasi anggaran belanja daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016. Rata-rata realisasi pengeluaran pemerintah Kota Bandar Lampung di sektor pendidikan meningkat pada tahun 2010-2014 dan di tahun 2015 menurun dalam realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Bandar Lampung, meningkat kembali pada tahun 2016 dan menjadi peningkatan terbesar dibanding dengan tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran belanja pemerintah Kota Bandar Lampung di sektor kesehatan rata-rata meningkat, peningkatan terjadi pada tahun 2016 dibanding dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2013. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan Kota Bandar Lampung.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008.²¹

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.²² Realisasi anggaran pada pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu membentuk modal manusia yang merupakan tonggak penting dalam pembangunan suatu daerah.

Realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan pada tahun 2014 berjumlah 713.850.652.054,00 pada tahun berikutnya mengalami penurunan yakni menjadi 653.445.452.969,74. Pada bidang kesehatan juga mengalami penurunan pada tahun 2012 berjumlah 127.599.898.813,80 dan tahun berikutnya turun menjadi 107.392.122.622,51. Akan tetapi di lihat dari indeks pembangunan manusianya tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya.

²¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, Online Tersedia di www.dpr.go.id

²² Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur", (Jurnal, Mulawarman, Volume 18, (2), 2016), h. 133-134.

Dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengingat tingkat IPM di Indonesia yang masih menempati posisi 113 dari 188 Negara diseluruh dunia, menurut UNDP (*United Nation Development Programme*).²³ Menurut data BPS Indonesia, Provinsi Lampung indeks pembangunan manusia menduduki posisi 24 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.²⁴ Sedangkan untuk Kota Bandar Lampung sendiri berada pada posisi ke 70 dari 553 Kabupaten Kota di Indonesia.²⁵

Dari uraian diatas maka penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis memilih untuk mengangkat judul **Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Eknomi Islam.**

²³ *Indeks Pembangunan Manusia Meningkatkan Kesenjangan Tetap Ada*, online tersedia dia <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html> , (diakses pada 7 Februari 2018)

²⁴ *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2016 (Metode Baru)*, online tersedia di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/16/1211/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2016-metode-baru-.html>, (diakses pada 7 Februari 2018)

²⁵ *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Kota 2016 (Metode Baru)*, online tersedia di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/09/05/1269/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-2016-metode-baru-.html>, (diakses pada 7 Februari 2018)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung 2010-2010 ?
2. Apakah belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung 2010-2010 ?
3. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016 ?
4. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung 2010-2016 dalam perspektif ekonomi islam ?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016.
- b. Untuk Mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016.
- c. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara simultan terhadap IPM di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016.

- d. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung 2010-2016 dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2010-2016 dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Bagi pemerintah, agar bisa menjadi bahan untuk evaluasi belanja pemerintah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM tersebut.
- c. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang pembangunan manusia.
- d. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada masyarakat yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang indeks pembangunan manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pada dekade 1990-an, definisi pembangunan telah semakin berkembang dengan didukung oleh pembangunan manusia (human development) sehingga terbentuk definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia (people centered development). Pada 1990 indeks dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI).²⁶

Perkembangan pembangunan manusia di Indonesia, seperti disebutkan dalam "Indonesia Human Development Report 2004" (UNDP), sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Kebutuhan akan peningkatan alokasi

²⁶ Maya Masita Septiarini, dan Sri Herianingrum, "Analisis I-Hdi (Islamic-Human Development Index) Di Jawa Timur)" , (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 5, Mei 2017), h. 31

pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang sosial tersebut makin sangat dibutuhkan sejak krisis ekonomi menerpa.²⁷

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).²⁸ Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahbub ul Haq dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development*, dan telah disepakati dunia melalui United Nation Development Programme (UNDP).

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia.²⁹

- a. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
- c. standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

²⁷ Charisma Kuriata Ginting S, Irsad Lubis dan Kasyful Mahalli, ” Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya ”, (jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.1, 2008), h. 19

²⁸ Nur Isa Pratowo, ”Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”, (Jurnal Studi Ekonomi Indonesia), H. 16

²⁹ Agus Tri Basuki, Endah Saptutyingsih, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusiatahun 2008 -2014” (Jurnal, Yogyakarta), h. 1

Setiap tahun daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian di atas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Modal dalam arti luas memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengacu pada man Dixon dan World Bank, modal dalam arti luas, meliputi modal fisik(*physical capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*naturalcapital*). Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai sangat tergantung kepada peningkatan pembentukan modal dalam arti luas, baik pembentukan modal fisik, modal manusia maupun modal alam. Menurut World Bank, modal fisik, modal manusia dan modal alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan.³⁰

Sebagian ahli berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya semata-mata dalam bentuk fisik, infrastruktur, namun dalam paradigma baru pembangunan adalah bagaimana pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga negara dari segi manusianya, jadi fokus utama pembangunan adalah bagaimana manusia sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pendapat Kuncoro yang menyatakan bahwa :³¹

”Pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi, dan pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan

³⁰ Tarmizi Abbas, “modal manusia dan pertumbuhan ekonomi”, urnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 11, Nomor 3. (Oktober 2010), h. 2

³¹ dwi Heriyanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010”, *jurnal indeks pembangunan manusi*. h. 6

mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai "instrumen" atau salah satu "faktor produksi" saja, bukan merupakan subyek dari pembangunan. Hal ini telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimalisasi kepuasan maupun maksimalisasi keuntungan belaka.³²

Pengertian pembentukan modal manusia adalah “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara, pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk.”³³

Modal manusia kini dipandang sebagai mesin pertumbuhan utama yang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi telah mendorong sejumlah ahli ekonomi pembangunan memusatkan kajiannya pada peranan modal manusia dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.³⁴

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah-masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transendental*). Oleh

³² *Ibid.*,

³³ M.L. Jhingan, *Op.Cit.*, h. 414.

³⁴ Tarmizi Abbas, *Loc.Cit.*,

karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, *ijma*, *qiyas*, maupun *ijtihad* para ulama fikih.³⁵

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokhnya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.³⁶

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli.³⁷

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah

³⁵ Agung Eko Purwana, "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (*Jurnal Justitia Islamica*, vol. 10/no. 1/jan, juni 2013), h.18.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Sunarni, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia DiKabupaten/Kota Se-Indonesia", (Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi, Bandar Lampung, 2017), h.17

satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.³⁸

The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup dan menikmati standar hidup yang layak. Bagaimana UNDP bisa mengukur pembangunan manusia itu? UNDP telah menyusun kuran alternatif tentang kesejahteraan, yaitu *The United Nations Development Program* (indeks pembangunan manusia). Menurut Schultz, ada lima cara pengembangan sumber daya manusia :³⁹

- a. Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.
- b. Latihan jabatan, termasuk megang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan.
- c. Pendidikan yang di organisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.

³⁸ Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, *Op.Cit.*, h.132

³⁹ Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Ekonosia, 2002),

- d. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian.
- e. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.⁴⁰

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 8 kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

2. Pengukuran Dan Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia.

a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

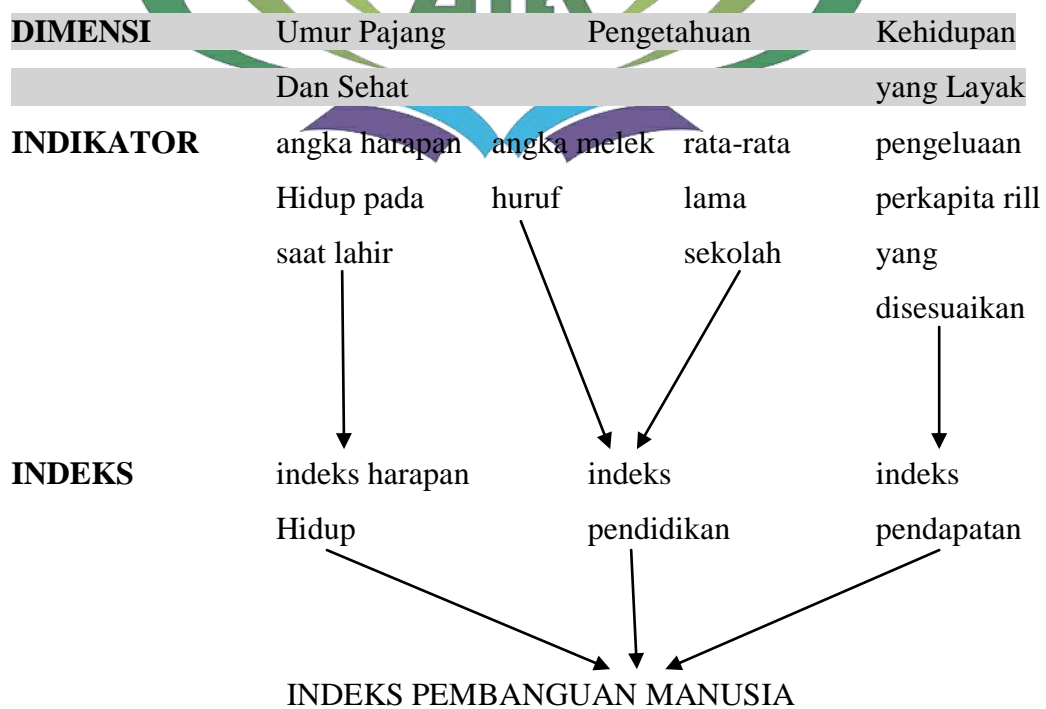
Penjelasan di dalam indeks pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan Manusia suatu Negara, yaitu :⁴¹

⁴⁰ M.L. Jhingan, *Loc.Cit.*,

⁴¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah. edisi revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 147

- 1) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (dengan bobot dua per tiga) dan angka lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- 3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan hidup layak. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:⁴²



Gambar 1. Diagram Penghitungan IPM

⁴² dwi Heriyanto, *Op.Cit*, h.8

Pada tahun 2010, UNDP telah menyempurnakan metode tersebut dengan metode baru yaitu dengan mengganti komponen sebelumnya yaitu angka melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia sehingganya sudah tidak efektif apabila masih menggunakan angka melek hidup.⁴³

b. Indeks Pembangunan Manusia Tradisional

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990, adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index- HDI*). HDI berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia rendah) sampai (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu:⁴⁴

- 1) Masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir.

⁴³ *Ibid.*, h.5

⁴⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.57

- 2) Pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dengan bobot dua per tiga, dan rasio partisipasi sekolah bruto (*gross school enrollment ratio*) dengan bobot satu per tiga.
- 3) Standar hidup yang diukur didasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) pendapatan.

c. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru

Pada bulan November 2010, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang baru (*New Human Development Index-NHDI*). Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan dan kesehatan, akan tetapi indeks baru ini memiliki delapan perubahan, yakni :⁴⁵

- 1) Pendapatan nasional bruto (GNI) menggantikan produk domestik bruto (GDP) per kapita.
- 2) Indeks pendidikan telah dirubah secara keseluruhan. Dua komponen baru telah ditambahkan yaitu rata-rata pencapaian pendidikan aktual seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari anak-anak di masa kini. Masing-masing perubahan ini menimbulkan implikasi. Jelas sekali bahwa

⁴⁵ *Ibid.*, h. 65-66

penggunaan ukuran pencapaian pendidikan aktual atau rata-rata lama bersekolah sebagai indikator merupakan perbaikan yang tidak ambigu. Estimasi dimutakhirkan secara teratur dan statistik dengan mudah diperbandingkan secara kuantitatif antar negara.

3) Pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru lainnya yang tidak ambigu, ukuran ini merupakan peramalan yang dilakukan PBB, bukan pencapaian.

4) Dua komponen yang sebelumnya dipakai sebagai indikator dalam indeks pendidikan yakni angka melek aksara dan partisipasi sekolah, tidak dipergunakan lagi.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.2 berikut :⁴⁶

Tabel 2.1

Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (tahun)	85	20	Setandar BPS
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	0	Setandar BPS

⁴⁶ *Ibid.*, h.9

Rata-rata sekolah (tahun)	15	0	Setandar BPS
Daya Beli (tahun)	26.572.352	1.007.436	Setandar BPS

Sumber data : Data BPS 2014

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X(i) - X(i) \text{ min}) / (X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min})$$

Dimana:

$X(i)$: Indikator ke-i ($i = 1, 2, 3$)

$X(i) \text{ maks}$: Nilai maksimum $X(i)$

$X(i) \text{ min}$: Nilai minimum $X(i)$ ⁴⁷

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan..Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut Suharto yaitu sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3) \dots\dots\dots)$$

Dimana :

$X(1)$: Indeks harapan hidup.

⁴⁷ Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, *Loc.Cit.*,

X (2): Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata).

X (3): Indeks standar hidup layak.⁴⁸

b. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1) Angka Harapan Hidup

Penduduk adalah kekeyaan nyata suatu bangsa. Perkembangan penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya sekedar berbicara pembangunan semata, tetapi juga haruspaham tentang pembangunan yang berkualitas dengan resiko yang seminim mungkin dengan manfaat yang luar biasa bagimasyarakat. Kualitas hidup yang dimiliki suatu negaraataupun wilayah, menggambarkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Terkait dengan kualitas hidup terdapat unsur angka harapan hidup (AHH) di dalamnya.⁴⁹

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Astri Vonita Ardianti, Sunlip Wibisono, Aisah Jumiati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Jember", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2015), h. 1

(*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.⁵⁰

Meurut BPS bahwa angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.⁵⁹ Dengan demikian, indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia rata-rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir.⁵¹

Secara empiris, menurut Soeratno pembangunan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang indikator keberhasilannya dapat diukur dari angka harapan hidup. Sementara itu, menurut Mungkasa peningkatan kualitas kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berarti mengurangi tingkat kemiskinan.⁵²

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) 2011-2013 yaitu :⁵³

- a) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- b) Rata-rata lama sakit (hari).
- c) Angka kesakitan (%).
- d) Persentase pemberian asi.

⁵⁰ Ayuk Putri Sugiantari dan I Nyoman Budiantara, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline" (*Jurnal Sains Dan Seni Pomits* Vol. 2, No.1, (2013), h.37

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Op.Cit.*, h. 30

⁵² Rahmawati Faturrohmin, "Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan", (Skripsi Program Sarjana Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, 2011) h. 31

⁵³ *Loc.Cit.*,

e) Rata-rata lama Balita disusui (bulan).

Indikator-indikator diatas dapat meningkatkan angka harapan hidup, sehingga indikator tersebut memaksa pemerintah untuk meningkatkan program-program kesehatan seperti peningkatan pelayanan publik yang dapat memicu meningkatkan angka harapan hidup penduduk.⁵⁴

2) Tingkat Pendidikan

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu negara menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut.⁵⁵

Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun produk domestik bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana

⁵⁴ *Ibid.*, h.59

⁵⁵ Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h. 111

pendidikan. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan seberapa jauh masyarakat menyadari pentingnya peranan pendidikan. Keadaan ini menjelaskan mengapa proporsi pengeluaran untuk sektor pendidikan di negara maju pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi di negara yang sedang berkembang.⁵⁶

Melalui investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di peroleh oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan produktifitas kerja seseorang, dan pada akhirnya seseorang yang memiliki produktifitas memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.⁵⁷

IPM dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian Manusia.⁵⁸

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

⁵⁶ *Ibid.*, h.112

⁵⁷ Ali Fahmu, "Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan", (Jurnal Development, Provinsi Jambi), h.89

⁵⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 16

tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.⁵⁹

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.⁶⁰

3) Standar Hidup Layak

Peraturan mengenai KHL secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 Ayat 2 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁶¹

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.⁶² Dalam cakupan luas, standar hidup

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, *Op.Cit.*, h. 10

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Op.Cit.*, h. 31

⁶¹ Beriya Tangkari Utama, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Komponen Dan Tahapan Pencapaian Hidup Layak Guna Mewujudkan Upah Layak”, (Skripsi Program Sarjanah Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), h. 4

⁶² Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah dan Suprpto, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 18, Nomor 4, 2014), h. 453

layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.⁶³

Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak.⁶⁴ Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.⁶⁵

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan.⁶⁶ Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Dalam perhitungannya, digunakan batasan minimum dan maksimum seperti yang dijelaskan pada tabel 2.1 Batasan minimum standar layak hidup adalah sebesar 1.007.436 sedangkan batasan maksimumnya adalah sebesar 26.572.352.⁶⁷

⁶³ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Loc.cit.*,

⁶⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Op.cit.*, h. 147

⁶⁵ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, Op.Cit.*, h. 5

⁶⁶ *Ibit*, h. 10

⁶⁷ Seperti yang dijelaskan oleh BPS pusat pada buku yang dipublikasikan bahwa standar ini sesuai dengan keadaan Indonesia pada saat ini yaitu Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua Daya beli

B. Indeks Pembangunan Manusia Ditinjau Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT jauh sebelum manusia diciptakan diberikan kebebasan terbatas kepada manusia untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan akal yang terdapat dalam diri manusia tersebut. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengelola sumber daya alam yang ada menggunakan akal yang juga diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَدْسِفُكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah : 30)⁶⁸

Dari firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan pemimpin dimuka bumi ini, yang diberikan akal untuk memelihara dan melestarikan alam, menggali dan mengelola sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

⁶⁸ Op.Cit., h.6

Allah menciptakan bumi beserta isinya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi, agar manusia dapat mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah SWT berikan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ قَلِيلًا ۚ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.* (Q.S Al- A'raaf : 10)⁶⁹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup di muka bumi ini manusia dibekali akal oleh Allah SWT. Akal ini merupakan alat untuk menuntut ilmu, dan ilmu merupakan alat untuk mempertahankan kesulitan manusia, maka islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, bukan saja ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya.⁷⁰

Sebagai makhluk berakal, manusia mengamati sesuatu. Hasil pengamatan itu diolah sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu dirumuskannya ilmu baru yang akan digunakannya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjangkau jauh diluar kemampuan fisiknya. Demikian banyak hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat manusia dapat hidup menguasai alam ini.⁷¹

⁶⁹ Ibid., h.204

⁷⁰ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 5

⁷¹ Ibid., h. 6

Maka dalam islam faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan.⁷² Islam memandang bahwa Manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai, *abdullah* (hamba Allah) dan *Khalifatullahu fil ard* yaitu wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.⁷³ Tentu saja yang dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri. Pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja. Allah SWT memerintahkan untuk menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas selama hayat dikandung badan dan Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١١ (Q.S Al-Mujadilah: 11)

Arinya :*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁷⁴

Dalam ayat diatas Allah SWT mempertegas bahwa ilmu lah yang akan menolong manusia selama di dunia, ilmu juga yang akan meningkatkan derajat manusia dimuka bumi dan menghilangkan segala kesulitan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini.

⁷² Islamic Indeks Pembangunan Manusia”, (On-line), tersedia di:
djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/ (18 Febuari 018)

⁷³ Loc. Cit.,

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), h.543

Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M – 13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu. Begitu banyak ayat yang membicarakan akan keutamaan ilmu. Firman Allah SWT:

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya

: “(apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”⁷⁵ (Q.S Az-Zumar: 9).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa manusia mempunyai akal yang digunakan untuk menuntut ilmu agar dapat menerima sebuah pelajaran untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dimuka bumi agar terhindar dari kesulitan.

Pada ayat tersebut terlihat adanya hubungan orang yang mengetahui (berilmu) dengan melakukan ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan Allah di akhirat serta mengharapkan ridha dari Allah, dan juga menerangkan

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Danakarya, 2014), h. 306

bahwa sikap yang demikian itu merupakan salah satu ciri dari *ulul al-bab*, yaitu orang yang menggunakan hati untuk menggunakan dan mengarahkan ilmu pengetahuan tersebut pada tujuan peningkatan akidah, ketekunan beribadah.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peran akal dalam mengenal hakikat segala sesuatu. Begitu pentingnya peran akal, sehingga bahkan dikatakan bahwa tak ada agama bagi orang yang tak berakal, dengan akal yang telah sempurna itulah maka Islam diturunkan ke alam semesta.

Allah akan meninggikan tempat bagiorang-orang yang berilmu disurganya dan menjadikan mereka di dalam surga termasuk orang-orang yang berbakti tanpa kekhawatiran dan kesedihan. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi umat manusia dan mengamalkannya juga merupakan ibadah. Semakin tinggi ilmu yang dikuasai, semakin takut pula kepada Allah SWT sehingga dengan sendirinya akan mendekatkan diri kepada-Nya.

Islam menetapkan lima tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang pada akhirnya merupakan alat untuk mencapai kemaslahatan. Jiwa dan akal merupakan alat bagi kesehatan dan pendidikan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan maupun pendidikan. Hanya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya untuk pembangunan. Baik dalam perkara ibadah sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya :mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, apabila mereka telah Suci. Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁷⁶ (Q.S Al-baqarah: 222)

Pada ayat di atas Allah mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan manusia secara langsung. Karena kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting seseorang dalam melakukan aktifitas. Salah satu cara yang diajarkan oleh islam untuk meraih kesehatan adalah dengan mengatur pola makan yang baik.

Dalam ayat lainnya Allah SWT mengingatkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal, yakni sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.⁷⁷ (Q.S An-Nahl: 114)

⁷⁶ Ibid, h. 44

⁷⁷ Ibid., h. 114

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh manusia sangat berpengaruh terhadap kondisi jasmani manusia tersebut, karena kesehatan juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa islam merupakan agama yang sangat kompleks, karena mengatur segala aspek kehidupan baik masalah duniawi, ataupun ukhrawi.

Al-Qur'an yang merupakan *kalam ilahi* dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia mengandung segala ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam ajaran islam. Karena kesehatan menjadi modal awal untuk beribadah kepada Allah secara optimal. Perhatian islam terhadap kesehatan dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan segala hal tentang kesehatan.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa islam memandang dalam suatu pembangunan bangsa perlu dibangun manusia itu sendiri maka pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa dianggap tidak penting. Pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa melalui peningkatan pembangunan manusia itu sendiri.

C. Peran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pemangunan Manusia

1. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Pada saat ini, secara universal bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di Negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan aktif bukan berlaku sebagai penonton pasif.⁷⁸ Sebuah sistem yang menyerahkan segala urusan ekonomi kepada swasta tidak dapat diterapkan di Negara terbelakang. Perusahaan swasta tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi Negara terbelakang tersebut. Disinilah peran pemerintah yang utama yaitu membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Rasionalitas dari peran pengeluaran pemerintah (utamanyapengeluaran untuk fasilitas publik sektor pendidikan,kesehatan,transportasi, irigasi dan lain-lain).⁷⁹

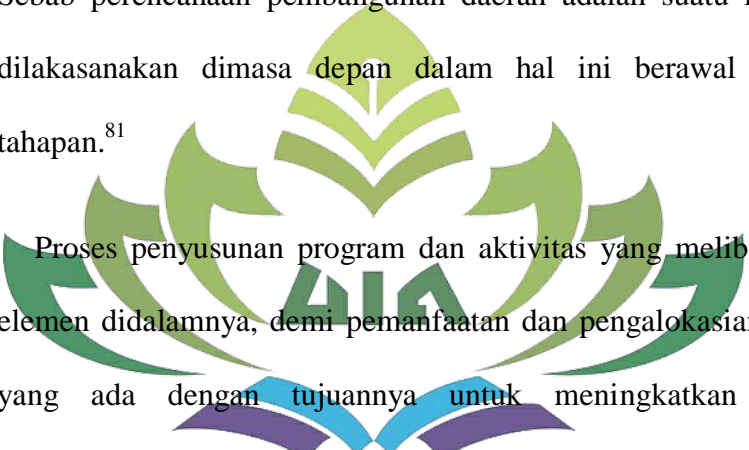
Peran pemerintah dalam sebuah Negara merupakan kunci utama untuk membuat kebijakan dalam perekonomian. Peran pemerintah daerah adalah upaya dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memacu

⁷⁸ M.L Jhingan, *Op.Cit.*, h. 431

⁷⁹ Rina Sukarmanl, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin, “analisis penagruh belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatra Selatan”, (Jurnal Pembangunan Manusia), h. 62

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁸⁰

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan.⁸¹



Proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.⁸²

2. Peran Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia

Peranan sumber daya manusia yang dibangun atau dikembangkan melalui proses pembangunan dari SDM itu dapat dipertanyakan, apakah dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia

⁸⁰Denni Sulistio Mirza, “Pengaruh kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”, (*Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1 (2012), h. 4

⁸¹Rmando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur, “peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No.2 (2015), h. 231-232

⁸²*Ibid.*,

seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan nasional Indonesia.⁸³ Yang perlu dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu atautkah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan. Penyediaan overhead sosial dan ekonomi di Negara terbelakang sebagian besar termasuk dalam kegiatan pemerintah. Pemberian pelayanan publik merupakan peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan publik.⁸⁴

Negara berkembang umumnya, biaya sosial pendidikan (biaya oportunitas/peluang yang dipikul masyarakat secara keseluruhan dari kebutuhan untuk mendanai perluasan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi dengan biaya mahal, padahal dana yang terbatas itu dapat digunakan secara lebih produktif di sektor-sektor ekonomi lainnya) meningkat dengan cepat ketika para peserta didik melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Biaya pribadi (*Private Cost*) pendidikan (biaya yang ditanggung peserta didik sendiri) meningkat lebih lamban atau bahkan menurun.⁸⁵

Dalam peningkatan kualitas pendidikan pemerintah telah melakukan upaya kebijakan program-program perluasan akses dan

⁸³ Mikael Eukarista Tewu, “peranan sumber daya manusia dalam meningkatkan aktivitas kelompok tani di desa tember”, (e-journal “Acta Diurna” , Volume IV. No.3, 2015), h.3.

⁸⁴ M.L Jhingan, *Op.Cit.*, h. 434

⁸⁵ *Ibid.*,

peningkatan pemerataan serta meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut:⁸⁶

- a. Program pendidikan anak usia dini.
- b. Program wajar pendidikan dasar 9 tahun.
- c. Program pendidikan menengah.
- d. Program pendidikan non formal.
- e. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
- f. Program pembangunan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

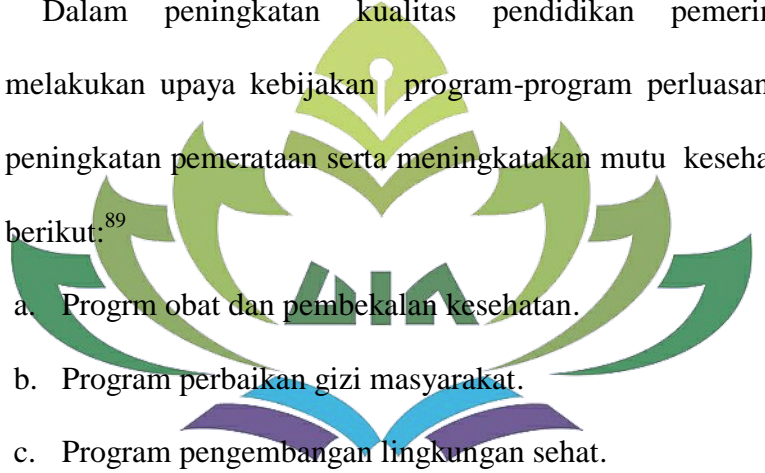
Pada umumnya, masalah divergensi manfaat biaya sosial versus pribadi terjadi karena adanya intervensi kebijakan public dan swasta yang tidak tepat terkait dengan selisih upah, selektivitas pendidikan dan penetapan layanan pendidikan. Akibatnya, perhitungan pribadi (individu) mengenai nilai dari pendidikan melebihi dari nilai sosialnya yang juga harus memperhitungkan masalah pengangguran. Masalah pengangguran sangat dilematis menjadi satu faktor yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan, dikarenakan dunia pendidikan perlu memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan untuk dapat mengarahkan sebagai modal dasar pendidikan. Hal ini diperlukan suatu kuliatas pendidikan yang mampu menempatkan sumber daya manusia menuju pada tingkat kesejahteraan.⁸⁷

⁸⁶ www.pemerintahkotabandarlampung.ac.id ,prioritas pembangunan kota bandar lampung.

⁸⁷ M.Umar Maya Putra, Parimin, "Peranan Pendidikan Dalam Esensi Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Asahan", (Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 5, Nomor 02, Oktober 2015), h. 132-134

Kesehatan merupakan faktor penting bagi suatu negara, karena kaitannya yang erat dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, selain penduduk, pemerintah pun sangat berkepentingan atas peningkatan kesehatan masyarakat secara umum.⁸⁸

Dalam peningkatan kualitas pendidikan pemerintah telah melakukan upaya kebijakan program-program perluasan akses dan peningkatan pemerataan serta meningkatkan mutu kesehatan sebagai berikut.⁸⁹

- 
- a. Program obat dan pembekalan kesehatan.
 - b. Program perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Program pengembangan lingkungan sehat.
 - d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - e. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
 - f. Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas.
 - g. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Adapun sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan juga salah satu kebutuhan pokok yang dapat perhatian oleh Islam. Karena jika

⁸⁸ Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, *Op.Cit.*, h.101

⁸⁹ www.pemerintahkotabandarlampung.ac.id, *Op.Cit.*,

pemenuhan kesehatan masyarakat terpenuhi dengan mudah, maka hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan.⁹⁰

D. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks pembangunan manusia

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Menurut Hasibuan peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.⁹¹

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013" (Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015), h. 2

jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.⁹² Pengeluaran untuk sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan) sehingga dapat menjadi bekal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga dapat lebih produktif dan berdaya saing dan pada gilirannya diharapkan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dan stabil.⁹³

Selain itu, kesehatan merupakan salah satu dasar kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan merupakan suatu investasi SDM untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).⁹⁴ Pengeluaran untuk bidang kesehatan

⁹² Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, *Op.Cit*, h. 133

⁹³ Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan, *Op.Cit*, h. 2

⁹⁴ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K, " Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengantasa Kemiskinan Melalui Peninkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, (*Jurnal Diamika Ekonomi Pembangunan* , vol. 1, No. 1 (Juli 2011), h. 31

diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat lebih berdaya dalam melakukan kegiatan yang produktif.⁹⁵

Pada penjelasan di atas terutama sektor pendidikan dan kesehatan baiknya pemerintah pusat dan daerah terus berkerja sama untuk memfokuskan fasilitas pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat hidup sejahtera. Pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memajukan negara ini, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan untuk kemajuan suatu negara.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Asri menyatakan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Todaro dan Smith menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi

⁹⁵ Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan, *Op.Cit.*,

salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.⁹⁶

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.⁹⁷

E. Pengeluaran Pemerintah Dan Kebijakan Publik Di Tinjau Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang diserahi amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Sesungguhnya, keseluruhan harta secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat.⁹⁸

Ada dua jenis kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

⁹⁶ Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lopian, Imelda Lajuck, *Op.Cit*, h. 20

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Suhrawardi K, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.7

- a. Mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi baik dalam kelompok sendiri, maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai oleh *baitul mal*.
- b. Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah SAW dan empat khalifah dengan mengeluarkan dana *baitul mal*.⁹⁹

Kedua jenis kebijakan ini disejajarkan pada bagian berikut untuk mengembangkan peran yang dimainkan setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

- 
- a. Penyebaran Islam.
 - b. Pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengembangan ilmu pengetahuan.
 - d. Pengembangan infrastruktur.
 - e. Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
 - f. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.¹⁰⁰

Pengeluaran negara yang lebih banyak untuk kemaslahatan umum pada zaman Rasulullah SAW dan *Khulafa Ar-Rasyidin* adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Sumber-Sumber Pengeluaran Negara Primer dan Sekunder yang Berhubungan dengan Masyarakat pada Zaman Rasulullah SAW dan Empat Khalifah

Primer	Sekunder
1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinnah

⁹⁹ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 275

¹⁰⁰ *Ibid.*,

2. Penyaluran zakat dan <i>ushr</i> kepada yang berhak menerimanyamenurut ketentuan Al-Quran termasuk para pemungut zakat	2. Hiburan ntuk para delegasi keagamaan
3. Pembayaran gaji untuk wali, <i>qadi</i> , guru, imam, <i>muadzin</i> , dan pejabat negara lainnya	3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka
4. Pembayaran upah para sukarelawan	4. Hadiah untuk pemerintah negara lain
5. Pembayaran utang negara	5. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak
6. Bantuan untuk <i>musafir</i>	6. Pembayaran denda atas mereka yang tidak sengaja terbunuh oleh pasukan kaum Muslimin
	7. Pembayaran untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	8. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW (80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
	9. Persediaan darurat

Sumber : *Adiwarman A karim, Ekonomi Makro Islam*¹⁰¹

Enam prinsip umum berikut dapat dijabarkan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik (peran pemerintah sebagai pembeli besar).

- a. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan masyarakat
- b. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan diatas penyediaan rasa tentram
- c. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan diatas kepentingan minoritas yang lebih sedikit

¹⁰¹ *Ibid.*, h.276

- d. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbana atau kerugian yang lebih kecil.
- e. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya
- f. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya.¹⁰²

F. Peneliti Terdahulu

1. Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ.

Siwu, melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana yang besar setiap tahunnya di Sektor Pendidikan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan.

b. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena besarnya Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ternyata masih belum mampu membantu pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sulawesi Utara, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membangun beberapa sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di beberapa tahun belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.¹⁰³

2. **Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto,** melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di kabupaten kutai timur. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan maka, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.

¹⁰³ Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, Dan Hanly F.Dj. Siwu, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara”, (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 no. 02, Juli 2015), h.10

- b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.
- c. Dalam realitanya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur, tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal tersebut terjadi, karena pada periode tahun 2009-2014, anggaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih sangat kecil. Anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, masih jauh dibawah setiap tahunnya selama periode pengamatan jika dibandingkan dengan alokasi pengeluaran ataupun belanja pemerintah lainnya, seperti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terus meningkat hal ini lah yang menyebabkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh dominan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, di Kabupaten Kutai Timur.¹⁰⁴

3. **Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan,** melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil analisis regresi

¹⁰⁴ Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto. *Op.Cit.* h. 139

menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2006-2013, artinya setiap kali pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran khususnya pada sektor kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- b. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2006-2013, artinya setiap kali pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran khususnya pada sektor kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.¹⁰⁵

4. **Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lapian, Imelda Lajuck,** melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi sulawesi utara. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

¹⁰⁵ Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan, *Op.Cit.* h. 7

- a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.¹⁰⁶

5. **Nadia Ayu Bhakti**, melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan alokasi dana APBD untuk pendidikan tidak merata antar provinsi di Indonesia. Keterjangkauan masyarakat untuk menikmati pendidikan kurang. Hal

¹⁰⁶ Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lopian, Imelda Lajuck, *Op.Cit*, h. 215

tersebut dibuktikan dengan program wajib belajar sembilan tahun tidak terlaksana dengan baik.

- b. APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. Pemerintah telah menyediakan akses pelayanan, dalam konteks layanan kesehatan bagi warga miskin, pemerintah telah meluncurkan berbagai program di-antaranya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan salah satu program yang sumber pendanaannya berasal dari APBD. Sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.¹⁰⁷

6. **Sunarni**, melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-indonesia. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik maupun pembahasan komprehensif berdasarkan fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- g. Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi yang utama dalam mencapai SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga perlu untuk diprioritaskan pengalokasian anggaran serta realisasinya.

¹⁰⁷ Nadia Ayu Bhakti, *Op.Cit*, h.467

- h. Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Peningkatan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang memadai dapat peneliti maknai sebagai pengaruh positif realisasi belanja fungsi kesehatan dalam kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat sehingga akan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.
- i. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti bahwa realisasi belanja fungsi ekonomi berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.
- j. PDRB atas dasar harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti belanja PDRB atas dasar harga konstan berkontribusi dan memengaruhi peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.¹⁰⁸

G. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi pembangunan, namun jumlah penduduk yang besar apabila tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran belanja pemerintah sektor

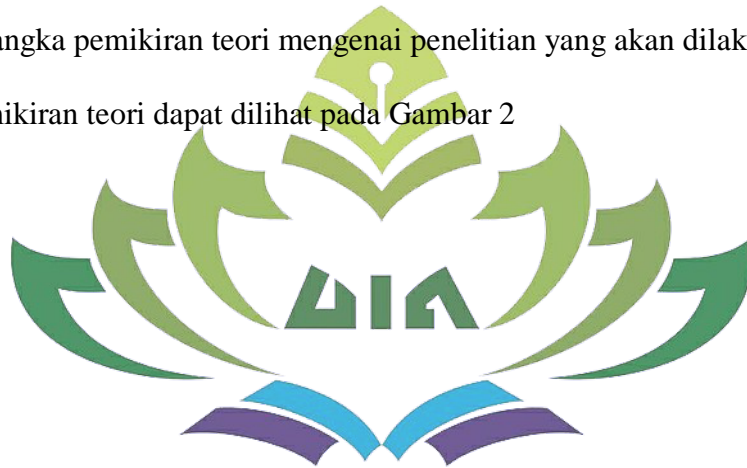
¹⁰⁸ Sunarni, “pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-indonesia” (Tesis, program pascasarjana magister ilmu akuntansi, Bandar Lampung, 2007), h. 50-51

pendidikan dan sektor kesehatan yang tersedia tidak dengan sesuai dengan jumlah penduduk akan mengakibatkan permasalahan pada daerah tersebut, tidak terjadinya peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk itu diperlukannya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dengan membangun ekonomi .di satu sisi, modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian investasi yang di curahkan untuk pendidik, karena kesehatan faktor penting agar seseorang bisa hadir kesekolah dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Harapan hidup yang lebih pnjang dapat meningkatkan pengemblian atas investasi dalam pendidikan: sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi modal pendidik. Di sisi lain modal pendidik yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan.¹⁰⁹

Peneliti sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, berpendapat pada sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks manuisa dan sektor kesehatan tidak ada pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Banyak peneliti peneliti terdahulu pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan pada kedua sektor. Artinya, semakin banyak belanja kedua sektor tersebut akan berpengaruh baik dan meningkatkan sumber daya manuisa.

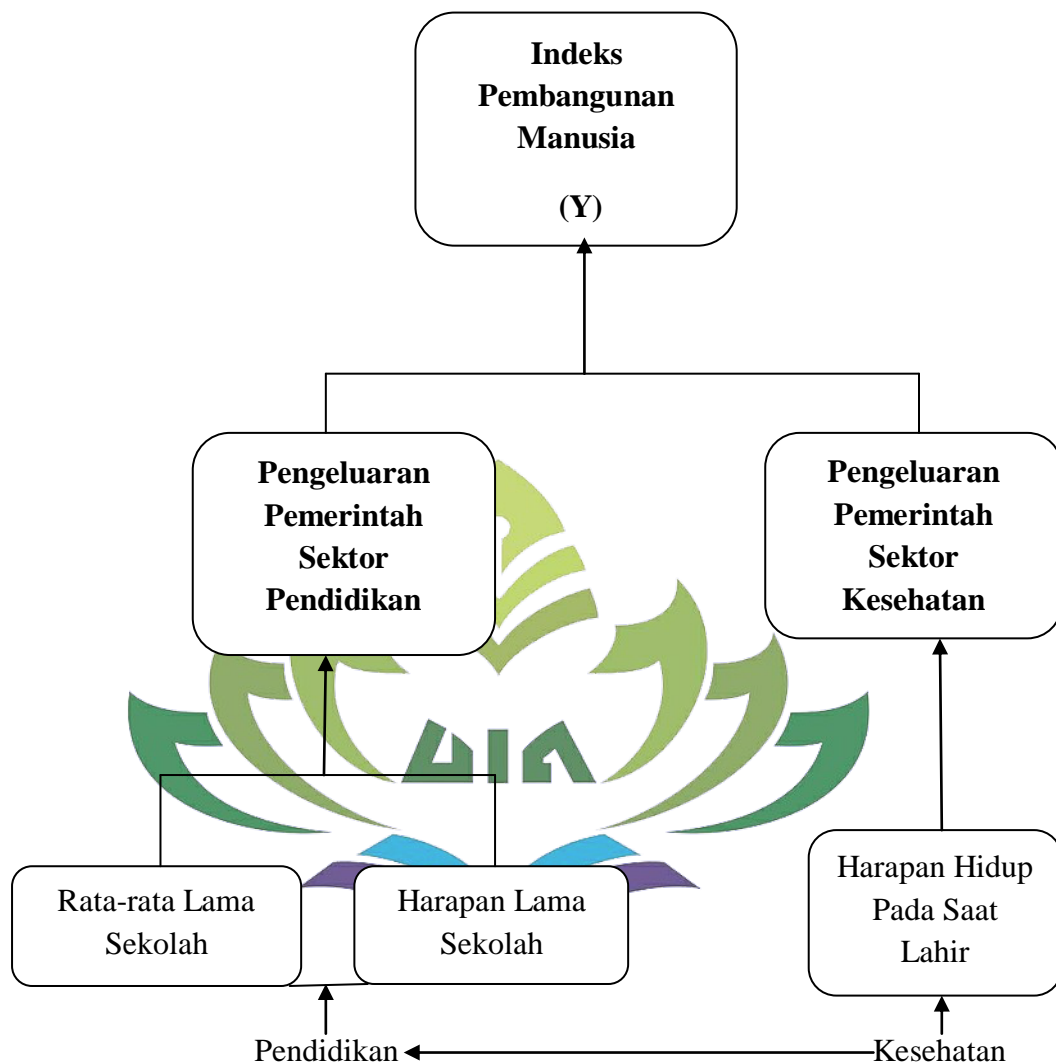
¹⁰⁹ Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Op.Cit*, h. 406-407

Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan antara variabel diatas, maka ditetapkan bahwa indeks pembangunan manusia Y, bidang kesehatan X1 dan bidang kesehatan X2, dimana dalam penelitian ini yang digunakan adalah belanja pemerintah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel belanj pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pemabngunan manusia. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 2



Kerangka Berfikir

Gambar 2



H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.¹¹⁰ Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), h.99

Besarnya jumlah belanja pemerintah dalam suatu bidang, menggambarkan optimalnya pembangunan sumber daya manusia dalam suatu bidang tersebut. Semakin besar belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan akan baik juga daerah tersebut indeks pembangunan manusia. Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia perlu adanya analisis yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia, di antaranya bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang sudah di jelaskan, maka dapat di lihat hubungan antara variabel independen terhadap di penden sebagai berikut :

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan, dan akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹¹¹

¹¹¹ Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, Dan Hanly F.DJ. Siwu, *Op.Cit.*, h. 1

Hal ini serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Merang Kahang, Muhammad Saleh dan Rachmad Budi Suharto Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu bahwa variabel bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Sehingga dari penjelasan teori dan belanja pemerintah bidang pendidikan maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. H_0 : bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
- b. H_1 : bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.¹¹²

Sejalan dengan oleh Merang Kahang, Muhammad Saleh dan Rachmad Budi Suharto Septiana M. M. Sanggelorang, Siwu penelitian yang

¹¹² Lok. Cit.,

dilakukan Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Hasil penelitian tersebut adalah bidang kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Sehingga dari penjelasan teori dan belanja pemerintah bidang pendidikan maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. H_0 : bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
- b. H_2 : bidang kesehatan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai dampak dari membaiknya ekonomi. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan standar hidup layak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.¹¹³ Hal ini di perkuat dengan penelitian yang di lakuakn dengan Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi dan Moh. Adenan dan sepakat kepada

¹¹³ Sunarni, *Op.Cit.*, h. 26

Sunarni hasil penelitian tersebut adalah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Sehingga dari penjelasan teori dan belanja pemerintah bidang pendidikan maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. H_0 : bidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
- b. H_3 : bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹¹⁴

Hal ini serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Lybrary Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dokumen yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat di seluruh bahan cetakan, sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh orang lain, maupun hasil laporan penelitian terdahulu mengenai belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.¹¹⁵

Penelitian ini menggali data yang bersumber dari data survey tahunan belanja pmerintah bidan pendidikan, kesehatan dan indeks pembangunan

¹¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), H.13

¹¹⁵ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.45

manusia yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik Bandar Lampung Lampung.

2. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif (Hubungan) , yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.¹¹⁶

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.¹¹⁷ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung baik secara simultan maupun parsial ditinjau dalam persepektif Ekonomi Islam.

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang

¹¹⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h.16

¹¹⁷ Sugiyono, *Op.Cit*,h.5

telah ada.¹¹⁸ Dimana data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, laporan tahunan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulisan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan tahunan dan dokumen lainnya.¹¹⁹ Data-data ini diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹²⁰

¹¹⁸ Iqbal Hasan, *Op.cit*, h. 82

¹¹⁹ *Ibid*, h.87

¹²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Kencana Alumni, 1998) , h.141

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹²¹. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data laporan tahunan survey indeks pembangunan manusia Bandar Lampung pertahun selama Kota Bandar Lampung berdiri yang telah di publikasikan oleh BPS Kota Bandar Lampung, yang diambil menjadi sampel yaitu 7 tahun terakhir dari tahun 2010 – 2016.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹²² Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel. Oleh karena adanya keterbatasan data yang dimiliki ataupun diterbitkan oleh dinas pendidikan dan kesehatan, maka peneliti memilih sampel tujuh tahun terakhir yaitu data belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Bandar Lampung dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2010-2016 yang telah tersusun dan diterbitkan oleh BPS Kota Bandar Lampung .

¹²¹Sugiyono, *Op.Cit*, h. 119

¹²²*Ibid*, h.126

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian¹²³. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel tujuh tahun terakhir yaitu tahun 2010-2016.

E. Definisi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung. Data indeks pembangunan manusia yang akan diteliti adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak BPS Kota Bandar Lampung yang diambil dari tahun 2010-2016.

2. Variabel Bebas (Variabel independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Bandar Lampung yang diperoleh dari BPS Kota Bandar Lampung dari tahun 2010-2016.

¹²³*Ibid*, h. 120

Tabel 3.1
Daftar Variabel Penelitian

Variabel	Ukuran	Referensi	Skala Pengukuran Variabel
Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X1)	Tingkat Pendidikan	Dinas Pendidikan	4.389.551.628.003,74
Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	866.753.138.643,03
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	UNDP	BPS	Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹²⁴

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

¹²⁴Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*(Yogyakarta: ANDI,2002),h.42.

1. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Alat Analisis

a. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat dikatakan lulus uji asumsi.

Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrovsmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- a) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.¹²⁵

2) Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*). Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolineritas (multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah koefisien korelasi antar variabel *independent* haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolineritas¹²⁶. Untuk mendeteksi multikolineritas adalah

¹²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015), h. 52-56

¹²⁶ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h.207.

dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus sebagai berikut:¹²⁷

VIF	Tolerance
-----	-----------

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2} \quad \text{dan} \quad (\hat{\beta}_i) = 1/VIF$$

Keterangan:

VIF : Variance Inflation Factor

R^2 : R-Square

di mana menurut Hair et al dalam Duwi Priyatno variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).¹²⁸ Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu). Beberapa yang sering digunakan adalah uji durbin watson, uji dengan *run test* dan jika data observasi diatas 100 data sebaiknya menggunakan uji *lagrange Multiplier*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi yang muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.¹²⁹

¹²⁷Agung Abdul Rasul, *Praktikum Statistika Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 134

¹²⁸ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h. 5.26

¹²⁹ *Ibit.*,

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.¹³⁰

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda. analisis regresi berganda, bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independent terhadap variabel dependent. persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut :¹³¹

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

B₀ = Bilangan Konstanta

b₁X₁ = Pendidikan

b₂X₂ = Kesehatan

c. Alat Analisis

1. Uji Hipotesis F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel idependen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu

¹³⁰Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : PT. Tarsito, 2009), h.373

¹³¹Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, *Ekonometri*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h.6

persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Nilai f hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-n-1)}$$

Keterangan :

R = Korelasi

K = variable independent

N = Jumlah sampel

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan uji berikut:¹³²

1) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

2) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :¹³³

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)

2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

2. Uji Hipotesis t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari

¹³²Sudjana, *Metode Statistic*, (Bandung : PT.Tarsito,2009),h.373

¹³³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta : Bumi Aksara,2012),h.89

masing-masing variabel independen yang terdiri atas belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia yang merupakan variabel dependennya. Adapun persamaan rumus uji t adalah sebagai berikut :

$$t_{hit} = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel

r = koefisien korelasi

Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program spss sebagai berikut.¹³⁴

- 1) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima
- 2) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :¹³⁵

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

¹³⁴ Sudjana, *Loc.Cit.*

¹³⁵ Iqbal Hasan, *Loc.Cit.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ Bujur Timur. Ibu kota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

2. Topografi

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap daerah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang.
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara.
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian 104maksimum 700 mdpl.Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan

Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 – 5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.

Di tengah – tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau , Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu : Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha Dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana Ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelumtum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Bara.

3. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjung Karang- Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nam menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kecamatan 30 Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan dan pemekaran Kelurahan yang semula berjumlah 98 Kelurahan menjadi 126 Kelurahan. Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Wali Kota Bandar Lampung Berserta Periode Jabatan

No	Nama Wali kota / KDH Tingkat II	Periode Jabatan
1.	Sumarsono	Periode 1956 - 1957
2.	H. Zainal Abiding P.A	Periode 1957 - 1963
3.	Alimudin Umar, SH	Periode 1963 - 1969
4.	Drs. H.M. Thabrani Daud	Periode 1969 - 1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	Periode 1976 - 1981
6.	Drs. H. Zulkarnain Subbing	Periode 1981 - 1986
7.	Drs. H.A Nurdin Muhayat	Periode 1986 - 1995
8.	Drs. H. Suharto	Periode 1996 - 2006
9.	Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd.	Periode 2006 - 2010
10.	Drs. H. Herman HN, MM	Periode 2010 s.d. sekarang

Sumber : Bandar Lampung Dalam Angka 2016

4. Sarana Prasarana Kota Bandar Lampung

a. Fasilitas Pendidikan

Tingkat produktivitas atau kompetisi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Berdasarkan data Pemerintah Kota Bandar Lampung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Review RPJMD Kota Bandar Lampung 2016-2021.

Tabel. 4.2
Jumlah Fasilitas Pendidikan

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT	Total
Kedaton	10	11	2	3	1	1	28
Sukarame	18	7	9	5	4	1	44
Tanjung Karang Barat	8	21	2	4	2	1	38
Panjang	11	19	12	4	2	0	48
Tanjung Karang Timur	8	16	4	2	3		35
Tanjung Karang Pusat	15	18	14	10	3	6	66
Teluk Betung Selatan	6	18	8	3	1	0	36
Teluk Betung Barat	4	11	8	2	0	0	25
Teluk Betung Utara	11	17	11	7	6	1	53
Rajabasa	14	16	7	4	3	9	53
Tanjung Senang	14	11	9	2	3	1	40
Sukabumi	16	17	7	0	2	0	42
Kemiling	12	19	9	5	2	2	49
Labuhan Ratu	8	11	3	2	1	5	30

Way Halim	14	14	5	2	1	0	36
Langkapura	8	7	2	0	0	1	18
Enggal	9	11	12	9	6	0	47
Kedamaian	11	10	7	4	3	2	37
Teluk Betung Timur	3	11	2	2	1	0	28
Bumi Waras	5	17	4	2	0	0	28
Jumlah	205	282	137	72	44	32	727

Sumber :RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun2016-2021

b. Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan didalam mengatasi masalah kesehatan maka Kota Bandar Lampung terus meningkatkan pelayanan dengan upaya pengadaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan diantaranya adalah, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik bersalin, klinik dan posyandu.

Tabel 4.3
Jumlah Fasilitas Kesehatan

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik Bantuan	Klinik Bersalin	Klinik	Posyandu
Kedaton	3	1	1	0	7	31
Sukarame	1	3	2	0	0	35
Tanjung Karang Barat	0	2	3	0	1	34
Panjang	0	1	2	0	6	50
Tanjung Karang Timur	0	2	2	0	0	29
Tanjung Karang Pusat	0	2	1	0	9	34
Teluk Betung Selatan	3	1	1	0	4	40
Teluk Betung Barat	0	1	4	1	1	26

Teluk Betung Utara	0	2	1	0	4	42
Rajabasa	1	1	5	0	2	33
Tanjung Senang	0	1	5	0	0	25
Sukabumi	0	3	2	0	3	44
Kemiling	1	3	8	0	1	41
Labuhan Ratu	0	1	1	0	1	27
Way Halim	2	1	3	2	1	36
Langkapura	0	1	2	0	1	25
Enggal	4	1	1	0	3	23
Kedamaian	0	1	3	0	3	29
Teluk Betung Timur	0	2	2	0	0	29
Bumi Waras	0	1	3	0	0	40
Jumlah	17	30	50	3	49	675

Sumber : Bandar Lampung Dalam Angka 2015

B. Gambaran Hasil Penelitian

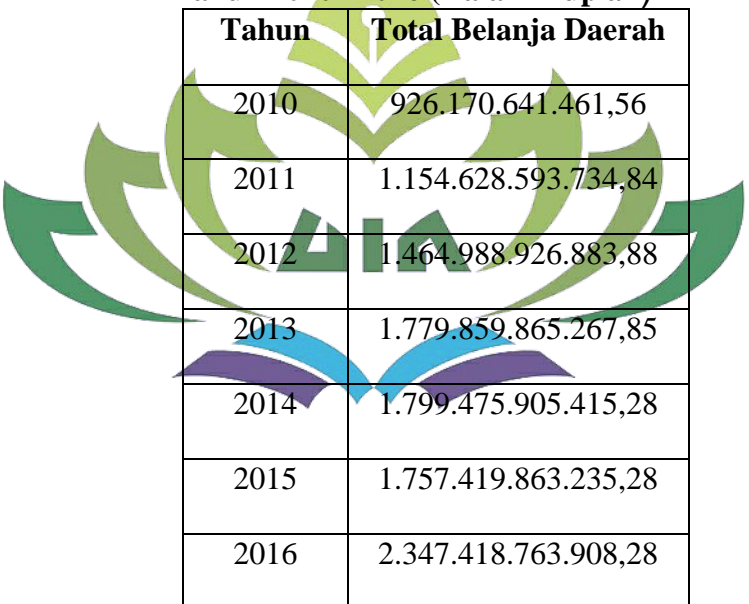
Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data Time Series atau rentang waktu mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) computer SPSS 16 dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari pangaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia yang terjadi di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun.

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa. Pengeluaran atau belanja pemerintah

mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan publik. Sebagai Ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki Pengeluaran/Belanja Pemerintah daerah yang cukup besar. Pengeluaran Pemerintah itu berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun total Pengeluaran Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Total Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung
Tahun 2010 –2016 (Dalam Rupiah)



Tahun	Total Belanja Daerah
2010	926.170.641.461,56
2011	1.154.628.593.734,84
2012	1.464.988.926.883,88
2013	1.779.859.865.267,85
2014	1.799.475.905.415,28
2015	1.757.419.863.235,28
2016	2.347.418.763.908,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota BandarLampung

Berdasarkan tabel 4.4, total Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 926.170.641.461,56 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2014

dengan total sebesar Rp. 1.799.475.905.415. Sedangkan pada tahun 2015 Pengeluaran Pemerintah di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan menjadi Rp. 1.757.419.863.235. Turunnya pengeluaran pemerintah pada tahun 2015 disebabkan menurunnya belanja Langsung dan tidak langsung dan menyebabkan tidak terealisasinya target yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian adanya ketidaktercapaian program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya karena tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya beberapa faktor -faktor internal Pemerintah Daerah.

2. Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat.. Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi pendidikan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural. Adapun total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Bandar Lampung dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Total Realisai Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
Kota Bandar Lampung Tahun 2010 –2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Bidang Pendidikan
2010	434.285.245.588
2011	551.417.693.499
2012	603.026.703.446,00
2013	716.387.361.619,00
2014	713.850.652.054,00
2015	653.445.452.969,74
2016	717.138.518.818,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

3. Belanja Pemerintah Bidang kesehatan

Belanja daerah menurut fungsi kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang kesehatan. Meningkatnya anggaran kesehatan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi kesehatan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesehatan masyarakat.. Belanja kesehatan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi kesehatan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural. Adapun total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang kesehatan Kota Bandar Lampung dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
Kota Bandar Lampung Tahun 2010 –2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Bidang Kesehatan
2010	57.022.929.944,00
2011	79.452.364.404,40
2012	127.599.898.813,80
2013	107.392.122.622,51
2014	148.732.226.265,48
2015	156.736.921.372,85
2016	189.816.675.219,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika $\text{sig.} > 0,05$ maka data berdistribusi dengan normal, jika $\text{sig.} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi secara normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorof-smirnov* dalam program SPSS 16. Hasil analisis terhadap asumsi

normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00373852
Most Extreme Differences	Absolute	.214
	Positive	.214
	Negative	-.162
Kolmogorov-Smirnov Z		.566
Asymp. Sig. (2-tailed)		.906

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data diolah SPSS 16

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.7 diatas dengan menggunakan metode *one sampel komogrov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel (N) sebesar 7 adalah 0,906. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,906 > 0,05$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multikolinieritas terjadi apabila ada kolerasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Jika hasil uji mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10 maka data tersebut lolos uji multikolinieritas. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut :


Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.386	.202		16.724	.000		
Pendidikan	.101	.036	.890	2.803	.049	.415	2.407
Kesehatan	.000	.009	-.029	-.092	.931	.415	2.407

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : data diolah SPSS 16

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 di atas bahwa variabel independen yang memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan variabel

independen VIF yang kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu). Beberapa yang sering digunakan adalah uji *durbin watson*, uji dengan *run test* dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji *lagrange Multiplier*. Pada data ini akan digunakan uji dengan *run test* sebagai berikut

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00136
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	3
Z	-.788
Asymp. Sig. (2-tailed)	.431

a. Median

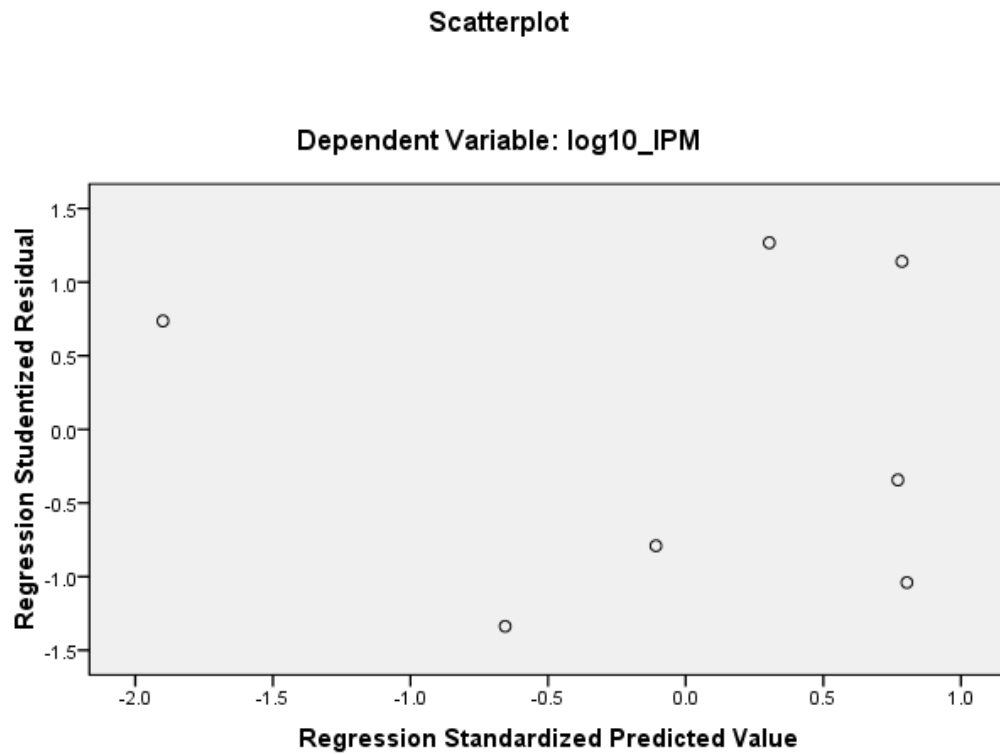
Sumber : data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel output di atas dapat dilihat bahwa nilai median (Test Value) adalah $-.00136$. Cases $<$ Test Value yaitu data yang kurang dari median berjumlah 3, cases \geq Test Value yaitu data yang lebih dari atau sama dengan nilai median berjumlah 4. Total data 7, jumlah run 3 dan nilai z sebesar -788 dengan signifikansi $0,431$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig) sebesar $0,431 > 0,05$ maka H_0 diterima. Jadi, data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang di uji.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* pada suatu periode pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil *output* heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah SPSS 16

Berdasarkan *output scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik menyebar dan tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Linear Berganda

Tabel 4.11
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.386	.202		16.724	.000
	Pendidikan	.101	.036	.890	2.803	.049
	Kesehatan	.000	.009	-.029	-.092	.931

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : data diolah SPSS 21

Pada prinsipnya model regresi linier merupakan suatu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan dan belanja

pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2010 - 2016. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 3.386 + 0,101X_1 - 0,000X_2 + e$$

Dimana : a = konstanta = 3.386

X_1 = Pendidikan $b_1 = 0,101$

X_2 = Kesehatan $b_2 = 0,000$

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 3,386 menunjukkan apabila variabel lain mengalami peningkatan 1% maka variabel indeks pembngunan manusia mengalami peningkatan sebesar 3,386%.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda koefisien regresi pada variabel 1 yaitu belanja pemerintah bidang pendidikan bertanda positif sebesar 0,101, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% belanja pemerintah bidang pendidikan maka indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 0,101%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara belanja pemerintah bidang pendidikan dan indeks

pembangunan manusia. Jika semakin besar belanja pemerintah bidang pendidikan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan sebaliknya jika belanja pemerintah bidang pendidikan menurun maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia.

- c. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda koefisien regresi pada variabel 2 yaitu belanja pemerintah bidang kesehatan Kota Bandar Lampung bertanda negatif sebesar 0,000, artinya menunjukkan setiap kenaikan sebesar 1% belanja pemerintah bidang kesehatan maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,000%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara belanja pemerintah bidang kesehatan dan indeks pembangunan manusia. Jika belanja pemerintah bidang kesehatan semakin meningkat maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia dan sebaliknya jika belanja pemerintah bidang kesehatan menurun maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (signifikan)
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut yang dimaksud dengan H_a adalah diterimanya hipotesis dan signifikan, sedangkan H_0 ditolaknya hipotesis dan tidak signifikan.

Adapun hasil uji F pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	9.935	.028 ^a
	Residual	.000	4	.000		
	Total	.001	6			

a. Predictors: (Constant), log10_Kesehatan, log10_Pendidikan

b. Dependent Variable: log10_IPM

Sumber : data diolah SPSS 21

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diatas menunjukkan nilai sig. 0,028 < 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dan adanya pengaruh yang signifikan kurang lebih sebesar 95% dari variabel pengeluaran belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia atau menentukan pengujian dengan cara lain yaitu dengan menentukan

terlebih dahulu F_{tabel} berdasarkan signifikansi 0,05, dengan df 1 (jumlah variabel – 1) atau $3-1 = 2$ dan df 2 ($n-k-1$) atau $7 - 2 - 1 = 4$. Jadi dapat diketahui $df_1 = 2$ dan $df_2 = 4$. Dengan pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh untuk F_{hitung} sebesar 9,935 sedangkan untuk F_{tabel} sebesar 6,94 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($9,935 > 6,94$) maka H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.

b. Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pengeluaran belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Dengan kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

- 1 Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima (signifikan)
- 2 Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan)

Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut yang dimaksud dengan H_a adalah diterimanya hipotesis dan signifikan, sedangkan H_o ditolaknya hipotesis dan tidak signifikan.

Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih

dahulu menentukan t_{tabel} dengan signifikan $5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $7-2-1 = 4$, dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh t_{tabel} sebesar 2.776.

1) Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel belanja pemerintah bidang pendidikan menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,803 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,803 > 2,776$) serta nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,049 < 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung selama periode 2010 – 2016.

2) Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel belanja pemerintah bidang kesehatan menghasilkan t_{hitung} sebesar -0,092 artinya t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,092 < 2,776$) serta nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 ($-0,092 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_o diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan kurang lebih 95 % tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung selama periode 2010 – 2016.

c. Uji koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R yang kecil menunjukkan menunjukkan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel-variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi, yaitu :

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.832	.749	.00458

a. Predictors: (Constant), log10_Kesehatan, log10_Pendidikan

b. Dependent Variable: log10_IPM

Sumber : data diolah SPSS 21

Berdasarkan hasil pengamatan dari tabel 4.13, diketahui koefisien determinasi (R) adalah 0,832. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas dalam penelitian untuk menerangkan variabel terikat adalah sebesar 83,2%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan mempengaruhi indeks pembangunan manusia sebesar 83,2% sementara sisanya yakni 16,8%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini seperti standar hidup atau tingkat kemiskinan.

D. Pembahasan

1. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung.

Pendidikan merupakan tonggak dalam perekonomian, melalui pendidikanlah sumber daya manusia yang berkualitas dapat terbentuk. Pemerintah memegang peran penting dalam suatu pembangunan, salah satunya yakni pembangunan manusia yang dapat dibentuk melalui pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda pada variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif sebesar 0,101, artinya menunjukkan kenaikan 1 % belanja pemerintah bidang pendidikan atau indeks pembangunan manusia maka pendidikan meningkat sebesar 0,101%. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji t) pada variabel belanja pemerintah bidang pendidikan juga menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,803 > 2,776$) serta nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,49 < 0,05$).

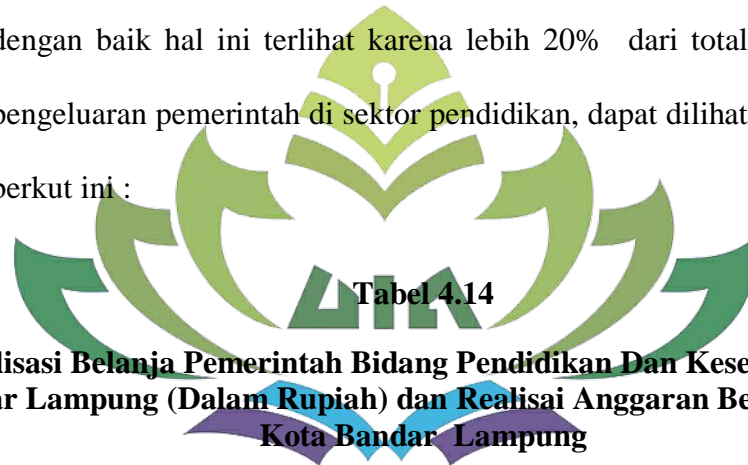
Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung selama periode 2010 – 2016.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010 – 2016. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, Hanly F.DJ. Siwu dan Sunarni. (Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto), Menyatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dimana disebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah

menyediakan anggaran minimal 20% dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini :



Tabel 4.14

Realisasi Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kota Bandar Lampung (Dalam Rupiah) dan Realisai Anggaran Belanja Daerah Kota Bandar Lampung

No.	Tahun	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Total Belanja Daerah
1	2010	434.285.245.588	57.022.929.944,00	926.170.641.461,56
2	2011	551.417.693.499	79.452.364.404,40	1.154.628.593.734,84
3	2012	603.026.703.446,00	127.599.898.813,80	1.464.988.926.883,88
4	2013	716.387.361.619,00	107.392.122.622,51	1.779.859.865.267,85
5	2014	713.850.652.054,00	148.732.226.265,48	1.799.475.905.415,28
6	2015	653.445.452.969,74	156.736.921.372.85	1.757.419.863.235,28

7	2016	717.138.518.818,00	189.816.675.219,99	2.347.418.763.908,28
---	------	--------------------	--------------------	----------------------

Diharapkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat lebih ditingkatkan agar mampu terealisasi kesemua bagian pada sektor pendidikan sehingga tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih besar di Kota Bandar Lampung.

Agar lebih baik pendidikan di Indonesia bisa menerapkan pendidikan Negara pertama yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia. Dari tahun ke tahun sistem pendidikan di Finlandia selalu menduduki peringkat teratas. Bahkan sebuah survey global mengatakan, Finlandia disebut sebagai Negara dengan kualitas hidup nomor satu di dunia. Sedikitnya ada 5 hal yang menjadikan Finlandia sebagai Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia peringkat pertama. Diantaranya, pilihan sekolah di Finlandia hanya sedikit dan semuanya dikelola oleh pemerintah, tidak ada tugas rumah, tidak ada ujian nasional, kurikulum pendidikan yang fleksibel, dan guru dengan kualitas terbaik.

Untuk tiap bayi yang lahir kepada keluarganya diberi *maternity package* yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Alasannya, PAUD adalah tahap belajar pertama dan paling kritis dalam belajar sepanjang hayat. Sebesar 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita dan 85% *brain paths* berkembang sebelum anak masuk SD (7

tahun), Kegemaran membaca aktif didorong. Finlandia menerbitkan lebih banyak buku anak-anak. Guru diberi kebebasan melaksanakan kurikulum pemerintah, bebas memilih metode dan buku teks. Stasiun TV menyiarkan program berbahasa asing dengan teks terjemahan dalam bahasa Finlandia sehingga anak-anak bahkan membaca waktu menonton TV. Semua itu diterapkan pemerintah Finlandia meskipun hanya memiliki sekolah sedikit, tapi Finlandia membuktikan bahwa mereka mampu memiliki sistem yang terbaik. Sekolah yang sedikit serta guru dengan kualitas terbaik adalah kuncinya.

Dengan adanya belanja pemerintah bidang pendidikan yang semakin meningkat pertahun Indonesia bisa menerapkan pendidikan Negara pertama yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia, agar sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing di dunia.

Denagan adanya pendidikan yang semakin baik maka akan memperluas kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sehingga pendidikan bisa dinikmati bukan hanya pada golongan atas melainkan juga masyarakat kalangan bawah. Pemerintah merupakan instrumen kunci kebijakan yang sudah seharusnya sangat memperhatikan hal pokok dalam proses pembangunan ekonomi, melalui ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tersebut nantinya akan pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia sejahtera. Dengan begitu akan mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi masalah.

Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan oleh Hasil analisis sesuai dengan teori Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Menurut Hasibuan peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.

Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung selama periode 2010 – 2016.

2. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung.

Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan badan yang sehat manusia bisa melakukan segala aktifitasnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup pun manusia harus memiliki badan yang sehat agar produktifitas mereka tidak terganggu, oleh karenanya kesehatan merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memperhatikan salah satu hal yang mendukung terciptanya pembangunan manusia yakni kesehatan, maka

pemerintah dapat memperhatikannya melalui alokasi anggaran pada bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda pada variabel kesehatan bertanda negatif sebesar 0,000, artinya menunjukkan setiap kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1 % maka akan menurunkan belanja pemerintah bidang kesehatan sebesar 0,000 %. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara belanja pemerintah bidang kesehatan dan indeks pembangunan manusia. Sementara berdasarkan uji 2 sisi signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel kesehatan menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,092 < 2,776$) serta nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 ($0,931 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kota Bandar Lampung 2010-2016.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Perbandingan dana pada sektor pendidikan yang lebih besar akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan kurang mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Karena kecilnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan belum terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena sedikitnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, dapat dilihat pada tabel 4.14.

Pada tabel 4.14 diatas dapat dilihat pengeluaran pemerintah bidang kesehatan disetiap tahunnya yakni dari tahun 2010 sampai dengan 2016 angka tersebut kurang dari 10 persen dari total belanja disetiap tahunnya. Maka hal ini menunjukkan belum teramanatkannya Undang-Undang No.36 Tahun 2009.

Artinya, setiap tahun pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan Kota Bandar Lampung setiap tahun meningkat akan tetapi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia diobjek penelitian tahun 2010-2016. Belanja pemerintah bidang kesehatan yang tidak dipengaruhi indeks pembangunan manusia dikarenakan pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan adanya UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, pengeluaran kesehatan pada tahun 2010-2016 kurang dari 10 persen.

Sudah seharusnya pemerintah Kota Bandar Lampung memikirkan dan mengalokasikan pengeluaran belanja kesehatan pada tingkat yang pantas atau sesuai dengan amanat Undang Undang No 36 Tahun 2009, agar fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati segala golongan bukan hanya golongan atas saja melainkan juga golongan bawah yang sudah sepatutnya sangat menjadi perhatian pemerintah. Ketika kesehatan masyarakat diperhatikan maka sangatlah mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, masyarakat yang sakit dapat berobat walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keadaan tubuh yang sehat masyarakat bisa belajar dan bekerja, maka dengan meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Agar lebih baik kesehatan di Indonesia bisa menerapkan kesehatan Negara yang memiliki sistem kesehatan terbaik adalah Singapura, Sistem Kesehatan, Ideologi, intervensi pemerintah dalam pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Singapura. Landasan dari sistem kesehatan Singapura terdiri dari tiga poin besar yaitu (1) negara memiliki tujuan untuk menciptakan populasi yang sehat dengan lebih menekankan kepada

pelayanan kesehatan preventif serta upaya untuk melakukan gaya hidup sehat, (2) Singapura lebih menekankan kepada tanggung jawab pribadi atau masing-masing penduduknya mengenai kesehatan mereka atau dalam kalimat lebih sederhana adalah kesehatan merupakan tanggung jawab masing-masing individu, dan (3) Pemerintah diharuskan untuk mempertahankan biaya pelayanan kesehatan serendah mungkin dengan cara mengontrol tingkat supply pelayanan kesehatan serta penyediaan subsidi untuk pelayanan kesehatan publik, Singapura memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi penduduknya melalui sebuah sistem pembiayaan yang berdasarkan kepada tanggung jawab individual dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Singapura juga mempunyai beberapa jenjang pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan primer (poliklinik atau klinik GP), pelayanan rumah sakit, serta Intermediate and Long Term Care Service (ILTC). Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan oleh dokter umum, dokter keluarga dan perawat di dalam komunitas. Pelayanan kesehatan jenis inilah yang pertama kali berkontak dengan pasien dan kemudian memiliki kemampuan untuk merujuk pasien ke spesialisasi kedokteran tertentu ataupun rumah sakit untuk diagnosis dan tata laksana yang lebih lanjut. Untuk layanan rumah sakit sendiri, singapura menyediakan delapan rumah sakit publik yang terdiri dari enam rumah sakit umum, satu rumah sakit ibu dan anak, serta satu rumah sakit psikiatri. Sedangkan ILTC sendiri digunakan untuk pasien-pasien yang tidak memerlukan perawatan di

dalam rumah sakit lagi, akan tetapi tetap membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya ILTC ini bersifat *community-based*.

Dengan keadaan saat ini kesehatan di Indonesia agar cepat mengambil langkah, pemerintah cepat tanggap dengan lebih baik kesehatan di Indonesia dari segi Sistem Kesehatan, Ideologi, intervensi pemerintah dalam pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan bisa menerapkannya sistemnya seperti Negara tetangga Singapura.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelum oleh Septiana M. M. Sanggелorang, Vekie A. Rumatе, dan Hanly F.DJ. Siwu .

Sanggелorang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia. Hasil analisis ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

3. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model regresi linear berganda dimana menggunakan uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh hasil untuk F_{hitung} sebesar 9,935 sedangkan untuk F_{tabel} sebesar 6,94 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($9,935 > 6,94$) maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Untuk nilai signifikan diperoleh dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.028. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016.

Hal ini sesuai dengan kejadian di lapangan bahwa setiap kenaikan anggaran belanja pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan di setiap tahunnya, maka meningkat pula tingkat indeks pembangunan manusia pada tahun 2010-2016.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hal ini juga sesuai dengan teori menurut Hera Susanti dkk bahwa pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah di suatu negara menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut.

Menurut Todaro & Smith, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan maupun kesehatan guna perbaikan layanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandar Lampung.

4. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Dalam Pandangan Ekonomi Islam pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negara tersebut. Pembangunan dalam Islam pula tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan secara moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat diperlukan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana yang dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan pemerintah yang direalisasikan melalui keuangan publik. Karena agar dapat terlaksana kegiatan pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan baik. Dalam Pandangan Islam untuk mencapai suatu kesejahteraan (*falah*) tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Dalam pemikiran Islam menurut An- Nabahan, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Manusia merupakan pelaku utama dalam sebuah pembangunan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam pembangunan Manusia. Bahkan Islam menjelaskan, kedudukan manusia dimuka bumi ini sebagai khalifah utusan Allah SWT. Allah mengutus manusia untuk memimpin bumi dan Allah menjadikan

manusia sebagai makhluk yang sempurna dari pada makhluk lain. manusia diberi akal dan juga nafsu. Allah menjelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنُحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 30)

Berdasarkan ayat tersebut Allah menjelaskan akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) disini sangat dituntut. Allah mengutus manusia untuk mensejahterakan kehidupan di bumi. Ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan Manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan (falah). Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM). Dalam pembangunan Manusia lebih lanjut, Islam menuntut Manusia untuk memiliki moral.

Pengoptimalan potensi Penerimaan pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat terealisasinya penerimaan di Negara Islam sehingga pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melalui distribusi pendapatan yang adil. Sama halnya dengan pemahaman ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam indikator makro ekonomi seperti Pengeluaran Pemerintah khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dalam pembahasan Ekonomi Islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat kesejahteraan masyarakatnya. Nash yang memerintahkan setiap dalam Negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syariat. Allah menjelaskan dalam Al-qur'an surat (Q.S Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu

dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 188)

Dalam pengertian ayat di atas jangan sebagian kamu memakan harta dari arti tersebut jangan memakan harta yang bukan hakmu dan Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang disertai amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Sesungguhnya, keseluruhan harta secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan atau kemasalahatan masyarakat.

Enam prinsip umum berikut dapat dijabarkan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik (peran pemerintah sebagai pembeli besar).

a. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan alokasi pengeluaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam alokasi untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan anggaran belanja sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan yakni sebesar 20% dari total belanja daerah. Sedangkan dalam alokasi belanja bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi Undang-Undang yang berlaku yakni 10% anggaran dari total belanja daerah.

Kesimpulannya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan anggaran belanja untuk kesejahteraan akan tetapi masih ada yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, terlebih lagi kesehatan merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan mendukung produktifitas masyarakat.

b. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan diatas penyediaan rasa tentram

Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan pada masyarakat dalam islam harus diutamakan, karena jika masyarakat terhindar dari segala macam kesulitan hidup maka rasa tentram dalam hiduppun akan terasa.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berupaya menghapus segala kesulitan dan penderitaan masyarakat lewat pengeluaran yang dianggarkan setiap tahunnya. Pengeluaran tersebut di salurkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pemberian bahan pokok secara gratis terhadap masyarakat dengan status ekonomi rendah dan masih banyak yang lainnya.

Akan tetapi kembali lagi terhadap jumlah anggaran yang dikeluarkan masih belum memenuhi jumlah persentase dari peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah itu sendiri. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan tepat sasaran dana tersebut ? sampailah dengan jumlah

yang tepat dana tersebut ?. Maka perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah agar kesulitan-kesulitan hidup masyarakat benar-benar terhapuskan.

c. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan diatas kepentingan minoritas yang lebih sedikit

Kepentingan masyarakat secara luas harus lebih diutamakan diatas kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah sebagai pembeli besar harus mengutamakan pengeluaran untuk masyarakat luas bukan untuk pemerintah itu sendiri ataupun golongan tertentu.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan pengeluarannya untuk segala kepentingan masyarakat luas yakni misalnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

d. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.

Dalam pandangan islam Pemerintah juga berperan sebagai pengambil keputusan, untuk menyelamatkan atau menghindari segala kerugian publik ataupun kerugian besar, pemerintah bisa mengorbankan kerugian individu untuk menghindari kerugian publik yang lebih besar.

e. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya

Dalam islam siapapun yang menerima segala macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, harus menanggung biayanya. Contohnya jalan raya yang dilewati oleh kendaraan, maka pemilik kendaraan harus membayar pajak kendaraan, pajak tersebut sebagai pemasukkan negara yang nantinya dipergunakan untuk meningkatkan ketersediaan segala macam fasilitas untuk lancarnya aktifitas sehari-hari masyarakat.

f. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya

Pengadaan fasilitas-fasilitas untuk menunjang lancarnya kehidupan masyarakat, misalnya fasilitas kesehatan dan pendidikan wajib dipenuhi. Karena dua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Tanpa tersedianya fasilitas kesehatan maka masyarakat tidak bisa berobat dan menjaga kesehatannya. Begitu juga sebaliknya walaupun tersedianya fasilitas kesehatan akan tetapi hanya bisa dinikmati golongan tertentu maka itu pun menjadi PR pemerintah yang harus dibenahi agar semua lapisan masyarakat dapat bisa mengakses kesehatan.

Maka jelas sekali pada penjabaran diatas islam sangat memandang bahwa alokasi pengeluaran yang paling utama adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dapat tercipta jika rasa tentram dalam masyarakat dapat terpenuhi. Salah satu pemberi rasa tentram adalah

dengan terjaminnya serta terpenuhinya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu *maqashid syariah* yang harus terpenuhi. *Maqashid syariah* merupakan lima tujuan dasar dalam mencapai *falah* diantaranya yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

Akal ini merupakan alat untuk menuntut ilmu, dan ilmu merupakan alat untuk mempertahankan kesulitan manusia, maka Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, bukan saja ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya.

Allah SWT memerintahkan untuk menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas selama hayat dikandung badan dan Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Mujadilah: 11)

Dalam ayat diatas Allah SWT mempertegas bahwa ilmu lah yang akan menolong manusia selama di dunia, ilmu juga yang akan meningkatkan derajat manusia dimuka bumi dan menghilangkan segala kesulitan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini.

Oleh sebab itu masalah pendidikan tidak bisa dianggap suatu hal yang remeh dan harus menjadi hal utama dan diwajibkan oleh agama. Ilmu menjadi pondasi awal manusia dalam menjalankan kehidupan, dengan adanya ilmu pengetahuan manusia bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dan terhindar dari kesulitan, begitu pula sebaliknya tanpa ilmu manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa.

Dalam menuntut ilmu diperlukan kesehatan maka kesehatan juga merupakan hal yang penting dalam agama islam, sebagaimana dalam mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan diakhirat) yang mencakup pemenuhan lima tujuan dasar kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jiwa yang sehat serta jasmani yang sehat penting untuk selalu diutamakan, karena dalam keseharian untuk beraktifitas manusia harus dalam keadaan yang sehat agar tidak terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk menjaga kesehatannya melalui seruan untuk makan makanan yang baik dan halal sebagaimana dalam firman-Nya yakni sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Artinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.*¹³⁶ (Q.S An-Nahl: 114)

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk hidup sehat baik dari segi apapun. Makanan yang baik disini dapat diartikan makanan yang mengandung gizi dan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh manusia sangat berpengaruh terhadap kondisi jasmani manusia tersebut, karena kesehatan juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi.

Dalam tubuh yang sehat akan terdapat rohani yang sehat serta akan menimbulkan pikiran yang positif dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu Kesehatan merupakan modal awal untuk beribadah kepada Allah secara optimal.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang dalam suatu pembangunan bangsa perlu dibangun manusia itu sendiri maka pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa

¹³⁶ *Ibid.*, h. 114

dianggap tidak penting. Pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa melalui peningkatan pembangunan manusia itu sendiri.

Oleh sebab itu penyediaan serta pelayanan publik dan fasilitas pendidikan maupun kesehatan harus terpenuhi dengan baik. Sudah menjadi tugas pemerintah Kota Bandar Lampung untuk selalu memperhatikan dan menyediakan fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan agar semua lapisan masyarakat baik masyarakat golongan atas maupun bawah yang ada di Kota Bandar Lampung dapat menikmatinya tanpa ada lagi hambatan, pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal dan jelas dan bermanfaat adanya transparan dari pemerintah khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam anggaran tersebut setiap tahunnya di publikasikan kepada masyarakat agar terciptanya kejujuran dan adil.

Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang disertai amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Sesungguhnya, keseluruhan harta secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan atau kemasalahatan masyarakat, agar masyarakat Kota bandar lampung memiliki sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya campur tangan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pas seperti pendidikan yang layak dengan adanya dana bos yang merata setiap sekolah sekolah gratis dengan

keluarga yang kurang mampu pemerintah wajib menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah dan di tambahnya pelayanan publik pelayanan kesehatan yang layak, setiap bulan memberi vitamin dan gizi kepada anak-anak dan lansia secara gratis agar mencapai suatu kesejahteraan (*falah*) tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatny.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 dalam Persepektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji secara parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel belanja pemerintah bidang pendidikan dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016, di karenakan belanja pendidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan.
2. Berdasarkan uji secara parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel belanja pemerintah bidang kesehatan dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016, di karenakan belanja kesehatan tidak sesuai dengan UU No 36 tahun 2009, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal

10% dari APBD di luar gaji, pengeluaran kesehatan pada tahun 2010-2016 kurang dari 10%.

3. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dapat dinyatakan secara simultan atau bersama-sama bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan, dikarenakan belanja pendidikan dan kesehatan bersama-sama setiap tahunnya mengalami kenaikan dan indeks pembangunan manusia Kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat.
4. Dalam Ekonomi Islam kaitan belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia masyarakatnya dimana harus mengandung enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik. Pemerintah kota bandar Lampung sudah menganggarkan belanja untuk masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan akan tetapi berdasarkan enam prinsip belanja pemerintah dalam Islam yakni kesejahteraan masyarakat, penghapusan kesulitan hidup, mengutamakan kepentingan khalayak ramai, menghindari kerugian publik, pemberian manfaat, dan pengadaan barang publik wajib terpenuhi. Dalam alokasi belanja bidang kesehatan belum sesuai dengan standar persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri dalam UU No 36 tahun 2009 besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji, jadi belum terpenuhinya enam prinsip tersebut dalam belanja pemerintah di Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan Kota Bandar Lampung dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan belanja daerah bidang pendidikan dan kesehatan melalui total belanja daerah khususnya pada bidang kesehatan yang harus lebih dari 10%, agar masyarakat Kota Bandar Lampung meningkatkan mutu SDM nya terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang dibina dan menghasilkan SDM yang berkualitas serta meningkatkan akses-akses pendidikan dan kesehatan sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 7 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdul Hakim, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi pertama, Yogyakarta, Ekonosia.
- Adiwarman A.Karim, 2015, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers.
- Agung Abdul Rasul, 2010, *Praktikum Statistika Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- BPS Kota Bandar Lampung, 2012, *Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya, Danakarya.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan dan BPS, Kota Bandar Lampung, 2010-2016, *Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung*.
- Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, 2012, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Iqbal Hasan, 2002, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah. edisi revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung, Kencana Alumni.
- Lincoln Aryad, 2015, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

M.L. Jhingan, 2014, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2011, *Pembangunan Ekonmi*, Jakarta.

Mudrajat Kuncoro, 2015, *Mudah Memahami dan Menganalisi Indikator Ekonomi*, Cetakan kedua, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Sadono Sukirno, 2004, *Makro Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Seperti yang dijelaskan oleh BPS pusat pada buku yang dipublikasikan bahwa standar ini sesuai dengan keadaan Indonesia pada saat ini yaitu Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua Daya beli

Soekidjo Notoatmojo, 2009, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta , Rineka Cipta.

Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, 2014, *Ekonometri*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sudjana, 2009, *Metode Statistik*, Bandung, PT. Tarsito.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung , Alfabeta.

Suhrawardi K, dkk, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumar'in, 2013, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Sutrisno Hadi, 2002, *Metode Research*, Yogyakarta, ANDI.

Tulus T.H Tambunan, 2003 , *Perekonomian Indonesia*, Jakarta Ghalia indonesia.

V. Wiratna Sujarweni, 2015, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Cetakan Pertama ,Yogyakarta, Pustaka Baru Perss.

-----, 2015, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Pers.

Wiratna Sujawerni, 2015, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustakabarupress.

Yusuf Qhardawai, 1408H/1998, *Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah*, Cet II Bairut Libanon, terjemahan Didin Hafifudin.

Zakiah Daradjat, dkk, 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sumber Jurnal:

- Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K, 2011, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1.
- Agung Eko Purwana, 2013, “pembangunan dalam perspektif ekonomi islam”. *Jurnal Justitia Islamica*, vol. 10/no. 1/jan.-juni.
- Ali Fahmu, ”Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan”, *Jurnal Developement*, Provinsi Jambi.
- Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lopian, Imelda Lajuck, 2017, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara*”, *Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 17 No. 01*
- Ayuk Putri Sugiantari dan I Nyoman Budiantara, 2013, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline” (*Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 2, No.1.*
- Charisma Kuriata Ginting S, Irsad Lubis dan Kasyul Mahalli, 2008
”Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya ”, (*jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.1.*
- Denni Sulistio Mirza, 2012, “Pengaruh kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1.
- M.Umar Maya Putra, Parimin, 2015, “Peranan Pendidikan Dalam Esensi Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Asahan”, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Volume 5, Nomor 02.
- Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, 2016, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Mulawarman, Volume 18, (2).*
- Mikael Eukarista Tewu, 2015,n“peranan sumber daya manusia dalam meningkatkan aktivitas kelompok tani di desa tember”, e-journal “Acta Diurna” ,Volume IV. No.3.

- Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan, 2015, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013”, *Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah dan Suprpto, 2014, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 18, Nomor 4.
- Sunarni, 2007, “pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-indonesia”, Tesis, program pascasarjana magister ilmu akuntansi, Bandar Lampung.
- Nur Isa Pratowo, Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*.
- Agus Tri Basuki, Endah Saptutyningsih, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008 -2014”, *Jurnal*, Yogyakarta.
- Maya Masita Septiarini, dan Sri Herianingrum, 2017, “Analisis I-Hdi (Islamic-Human Development Index) Di Jawa Timur1”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 5.
- Rina Sukarmanl, Taufiq Marwa, Tadjuddin Husin, “analisis pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatra Selatan”, (*Jurnal Pembangunan Manusia*).
- Astri Vonita Ardianti, Sunlip Wibisono, Aisah Jumiati, 2015, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Jember”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Beriya Tangkari Utama, 2007, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Komponen Dan Tahapan Pencapaian Hidup Layak Guna Mewujudkan Upah Layak”, Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tarmizi Abbas, 2010 “modal manusia dan pertumbuhan ekonomi”, *urnal E-Mabis FE-Unimal*, Volume 11, Nomor 3.
- dwi Heriyanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IpM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010”, *jurnal indeks pembangunan manusi*.

Rmando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur, 2015, “peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No.2.

Sumber Internet :

Indeks Pemangunan Manusia Menurut Kabupaten\Kota 2010-2016, online tersedia di: <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2016/10/03/11/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-2010---2016.html>

Indeks Pembangunan Manusia Meningkatkan Kesenjangan Tetap Ada, online tersedia di: <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html> , (7 Februari 2018)

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2016 (Metode Baru), online tersedia di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/16/1211/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2016-metode-baru-.html>, (7 Februari 2018)

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Kota 2016 (Metode Baru), online tersedia di <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/09/05/1269/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-2016-metode-baru-.html>, (7 Februari 2018)

Indeks Pembangunan Manusia” (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia#Sejarah

Islamic Indeks Pembangunan Manusia”, (On-line), tersedia di: djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/ (18 Febuari 018)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Online Tersedia di: http://www.kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Online Tersedia di: <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU%20Nomor%2036%20Tahun2%20009%20tentang%20Kesehatan.pdf>.

Undang- Undang Republik Indoensia Nomor 47 Tahun 2009, Online Tersedia di
www.dpr.go.id

www.pemerintahkotabandarlampung.ac.id ,prioritas pembangunan kota bandar
lampung.

